



# **BUKU PEDOMAN**

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2021**

# **PIMPINAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.Hum.

NIP. 197208232000032001

**WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK  
DAN KEMAHASISWAAN**



Solechan, S.H., M.Hum.

NIP. 196709141993031002

**WAKIL DEKAN  
BIDANG SUMBER DAYA**

**PIMPINAN PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Marjo, S.H., M.Hum.  
NIP. 196503181990031

**KETUA PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196805251993032011

**SEKRETARIS PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Buku Pedoman Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2021 ini tepat waktu. Buku Pedoman ini sebagai sarana untuk mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar bagi para mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum. Dalam buku pedoman ini dimuat penjelasan tentang penyelenggaraan Program Studi S-1, proses pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Buku Panduan Program Studi S-1 Ilmu Hukum Tahun 2021 ini disusun oleh karena tuntutan perkembangan pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional serta untuk mewujudkan visi dan misi Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Visi Program Studi S-1 Ilmu Hukum yaitu: “Pada tahun 2025 menjadi program studi kelas dunia yang berbasis riset untuk menghasilkan sarjana hukum profesional dan bermoral yang berfikir progresif dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila”. Adapun misi Program Studi S-1 Ilmu Hukum yaitu : menyelenggarakan pendidikan hukum secara kompeten di bidang ilmu hukum untuk menghasilkan sarjana hukum yang kompetitif dan progresif, menyelenggarakan penelitian bidang hukum yang kompetitif dan progresif, yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan nasional, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan nasional dan menyelenggarakan kerjasama dengan tujuan untuk memperluas jaringan dengan institusi nasional dan internasional.

Semoga Buku Panduan Program Studi S-1 Ilmu Hukum ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa serta dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Semarang, 20 Mei 2021

Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum

Ttd

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

# DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| PIMPINAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO .....                                | i   |
| PIMPINAN PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS<br>DIPONEGORO..... | ii  |
| KATA PENGANTAR .....  | iii |
| DAFTAR ISI.....   | iv  |
| BAB I PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI.....  | 1   |
| A. Sejarah Program Studi S-1 Ilmu Hukum .....                                       | 1   |
| B. Visi dan Misi Program Studi S-1 Ilmu Hukum .....                                 | 3   |
| C. Tujuan Program Studi S-1 Ilmu Hukum.....   | 4   |
| D. Sasaran Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.....  | 4   |
| E. Profil dan Deskripsi Lulusan .....   | 4   |
| F. Capaian Pembelajaran Lulusan.....  | 5   |
| G. Jenis Prodi.....   | 6   |
| H. SOTK.....  | 7   |
| I. Kemahasiswaan.....   | 8   |
| BAB II PROSES PENDIDIKAN .....  | 11  |
| A. Penerimaan Mahasiswa Baru.....   | 11  |
| B. Masa Studi Program S-1 Ilmu Hukum.....   | 14  |
| C. Beban Studi.....   | 18  |
| D. Penilaian (Mata Kuliah dan Tugas Akhir).....                                     | 19  |
| E. Evaluasi Hasil Belajar.....  | 20  |
| F. Penentuan Kelulusan dan Wisuda.....  | 22  |
| BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .....  | 24  |
| A. Perkuliahan .....  | 24  |
| B. Magang .....   | 59  |
| C. Tugas Akhir - Penulisan Hukum (Skripsi).....                                     | 61  |
| D. Publikasi Mahasiswa.....   | 63  |
| LAMPIRAN –LAMPIRAN.....   | 66  |
| A. Alur Tahapan Perkuliahan .....   | 66  |
| B. Alur Magang (Kerja Praktek) .....  | 68  |
| C. Alur Tugas Akhir – Penulisan Hukum (Skripsi).....                                | 69  |
| D. Contoh Cover Skripsi Dan Lain –Lain .....  | 70  |

# **BAB I PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI**

## **A. Sejarah Program Studi S-1 Ilmu Hukum**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan Program Studi S-1 Ilmu Hukum tertua di lingkungan Universitas Diponegoro. Sejak berdiri pada tahun 1957 hingga saat ini, Program Studi S-1 Ilmu Hukum telah mengalami perkembangan dengan semakin membaiknya sistem pendidikan, bertambahnya jumlah dan kualitas staf pengajar (dosen), serta bertambah lengkapnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Pengelolaan Program Studi S-1 Ilmu Hukum yang semakin membaik ini diarahkan untuk peningkatan kualitas lulusan. Dilihat dari output yang dihasilkan, Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan kehidupan bangsa dalam pembangunan. Lulusan yang dihasilkan telah tersebar di seluruh Indonesia dengan menduduki jabatan-jabatan di lingkungan birokrasi, swasta maupun masyarakat. Kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terlihat dari penelitian-penelitian yang dilakukan, penerbitan buku-buku ilmu hukum yang menjadi standar dalam pengembangan ilmu hukum di tingkat nasional, serta berbagai karya tulis di bidang hukum yang diterbitkan secara berkala melalui majalah dan jurnal ilmiah maupun melalui media massa.

Pengembangan Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada masa yang akan datang selain tetap didasarkan pada kebutuhan Program Studi S-1 Ilmu Hukum juga memperhatikan kecenderungan perubahan tatanan sosial masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional serta perubahan tata pemerintahan. Berdasarkan evaluasi diri melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, Program Studi S-1 Ilmu Hukum cukup memiliki kekuatan untuk dikembangkan. Kekuatan tersebut antara lain kualifikasi tingkat pendidikan staf pengajar (dosen) yang sudah memadai, rasio jumlah dosen dengan mahasiswa terjaga secara ideal, lulusan yang mempunyai indeks prestasi tinggi, masa studi dan masa tunggu yang relatif singkat. Sekalipun demikian pengembangan Program Studi S-1 Ilmu Hukum harus tetap secara terus-menerus dilakukan melalui kerjasama yang sinergis antara pimpinan, dosen, staf administrasi dan juga andil mahasiswa demi peningkatan kualitas pengajaran dan mutu lulusan. Ditinjau dari segi historis, Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah lanjutan dari Fakultas Hukum Universitas Semarang. Nama Universitas ini diambil dari nama Yayasan Universitas Semarang (Akta Notaris RM. Soeprpto tanggal 21 Desember 1956 Nomor 59 : Berita Negara tanggal 18 Januari 1957 Nomor 59).

Universitas Semarang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957 di Ruang Sidang Balai Kota Semarang dengan kuliah umum oleh Mr. Imam Bardjo selaku Presiden Universitas Semarang yang pertama dengan judul “Hak-hak Asasi

Manusia". Pendirian Universitas Semarang ini ternyata mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat luas dan juga dari Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam suratnya tertanggal 2 Juni 1957 Nomor U.159/I/1957 telah memohon kepada pemerintah pusat agar Universitas Semarang mendapat pengakuan dari pemerintah. Fakultas pertama yang didirikan ialah Fakultas Hukum yang merupakan cikal bakal Program Studi S-1 Ilmu Hukum yang segera diikuti oleh Akademi Administrasi Negara, Akademi Tata Niaga dan Akademi Teknik.

Pada saat pembukaannya Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum sudah mempunyai 178 mahasiswa dengan perincian : 118 orang di Tingkat I, 28 orang di Tingkat II dan 32 orang sebagai mahasiswa pendengar. Mereka yang diterima di Tingkat II ialah mereka yang berasal dari universitas-universitas lain (negeri dan swasta) yang sudah duduk di tingkat tersebut. Banyaknya jumlah mahasiswa pendengar merupakan indikator betapa besar perhatian masyarakat akan pendidikan tinggi, khususnya di Semarang. Bantuan spontan datang dari para sarjana hukum, baik dari kalangan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri maupun Advokat yang bersedia untuk menjadi tenaga pengajar. Bahkan di antaranya ada yang tidak menghendaki diberi honorarium. Hal ini membuktikan semangat yang tinggi untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan tinggi. Mengingat para pengambil inisiatif pendirian universitas itu tidak mempunyai pretensi untuk dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sempurna, maka mereka beberapa kali telah mengadakan hubungan dengan pimpinan Universitas Negeri Gadjah Mada yaitu Prof. Dr. Sardjito dan Prof. Drs. Notonagoro, S.H.

Komunikasi juga dilakukan dengan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gadjah Mada yang waktu itu dijabat oleh Prof. A. Soehardi, S.H., dan juga dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Djoko Soetono. Beliau yang mengetahui bahwa para pendiri Universitas itu adalah bekas-bekas mahasiswanya, bersikap sangat simpatik atas maksud pendirian Fakultas Hukum di Semarang itu, akan tetapi tidak dapat membantu banyak. Kendati demikian dorongan moril ini menebalkan semangat untuk meneruskan perjuangan.

Pada kesempatan peringatan Dies Natalis ke-3 Universitas Semarang yang diadakan pada tanggal 9 Januari 1960 Presiden Republik Indonesia berkenan memberi nama baru kepada Universitas Semarang, yaitu : Universitas Diponegoro yang masih tetap merupakan universitas swasta.

Sementara itu Ketua Yayasan Universitas Semarang yang sejak tahun 1958 berhubung dengan kepindahan Presiden Universitas, Imam Bardjo, S.H. ke Jakarta merangkap pula sebagai Presiden Universitas, bersama-sama dengan pimpinan Daerah Propinsi Jawa Tengah mengusahakan agar Universitas Diponegoro (swasta) dijadikan Universitas Negeri. Hasil pertama dari usaha ini adalah ditetapkannya Sudarto, S.H. yang semula menjabat pada pengawas Kejaksaan-kejaksaan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pegawai

tinggi yang diperbantukan pada Fakultas Hukum Universitas (swasta) Diponegoro pada pertengahan tahun 1960.

Untuk menunjang kegiatan operasional perkuliahan, maka fasilitas perkuliahan yang berupa ruangan dan alat-alatnya diterima oleh Yayasan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (swasta) ini pernah menggunakan rumah bekas kediaman Gouverner van Midden Java (yang pernah menjadi gedung Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan juga Balai Kota, sekarang lebih dikenal dengan nama Wisma Perdamaian). Pada tahun 1966 atas petunjuk Penguasa Perang Daerah, Fakultas Hukum mendapat tempat untuk kantor dan ruang kuliah di Jalan MT Haryono No. 427, yang kemudian pindah tempat yang lebih luas yaitu di Jalan Pemuda No. 63. Pada tahun 1969 Fakultas Hukum pindah lagi di kompleks Pleburan di Jalan Imam Barjo, S.H. No. 1 Semarang hingga kini.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah pada waktu itu untuk mendirikan Universitas Negeri di tiap Daerah Tingkat I (Provinsi), maka Universitas (swasta) Diponegoro ditinjau langsung oleh Kepala Badan Koordinasi Perguruan Tinggi, Prof. Dr. Soegiyono Djoenot Poesponegoro, untuk dipertimbangkan kemungkinannya menjadikan Universitas (swasta) Diponegoro sebagai Universitas Negeri. Akhirnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 didirikanlah Universitas Negeri Diponegoro (Undip) dengan fakultas-fakultas yang berasal dari Universitas (swasta) Diponegoro. Program Studi S-1 Ilmu Hukum yang merupakan Program Studi S-1/Fakultas tertua di universitas ini dijadikan sebagai 'Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat'. Kemudian pada tahun 1968 diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 116 Tahun 1968 Tanggal 2 Desember 1968 yang menetapkan Fakultas dan Pengetahuan Masyarakat menjadi Fakultas Hukum, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 1969 dijadikan tanggal berdirinya Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## **B. Visi dan Misi Program Studi S-1 Ilmu Hukum**

Untuk mengembangkan Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum terutama harus menetapkan visi dan misi.

1. Visi Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:  
Menjadi program studi kelas dunia yang berbasis riset untuk menghasilkan sarjana hukum profesional dan bermoral yang berfikir progresif dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila pada tahun 2025.
2. Misi Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:



- a. Menyelenggarakan pendidikan hukum secara kompeten di bidang ilmu hukum untuk menghasilkan sarjana hukum yang kompetitif dan progresif.
- b. Menyelenggarakan penelitian bidang hukum yang kompetitif dan progresif, yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan nasional.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan nasional.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan tujuan untuk memperluas jaringan dengan institusi nasional dan internasional.

### **C. Tujuan Program Studi S-1 Ilmu Hukum**

Tujuan Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Terselenggaranya proses pendidikan ilmu hukum yang berkualitas dan menghasilkan lulusan sarjana hukum yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif (lokal, nasional, dan global), yang bermoral.

### **D. Sasaran Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**

Sasaran Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

- 1) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu, teknologi dan kesenian;
- 2) Meningkatkan suasana akademik yang kondusif;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan produktivitas;
- 4) Manajemen internal, organisasi, kepemimpinan yang tangguh dan memiliki akuntabilitas dan transparan;
- 5) Terpeliharanya kemampuan untuk berkembang;
- 6) Meningkatkan kemudahan secara sama di bidang pendidikan tinggi;
- 7) Meningkatkan kesejahteraan.

### **E. Profil dan Deskripsi Lulusan**

#### **1. Profil Lulusan Program Studi S-1 Ilmu Hukum**

Profil lulusan Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro setelah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan bidang keilmuan/keahlian dari Program Studi S-1 Ilmu Hukum mempunyai Profil “**THE SEVEN STAR**” yaitu mempunyai kemampuan:

1. *Law Policy Maker*, mampu memahami pengetahuan hukum yang berkaitan

dengan kebijakan hukum dan merancang produk peraturan perundangan dan kontrak-kontrak privat (nasional dan internasional), maupun perjanjian internasional,

2. *Law Problem Solver*, mampu memahami pengetahuan hukum berkaitan dengan kebijakan hukum dan memberikan solusi cerdas terhadap perkara-perkara hukum yang disengketakan dalam pengadilan maupun arbitrase,
3. *Negotiator*, mampu melakukan negosiasi perancangan kontrak dan perjanjian internasional serta perkara-perkara hukum di pengadilan,
4. *Entrepreneur*, mampu menciptakan bidang usaha sendiri sesuai profesi, sehingga mengubah *mindset* para lulusan dari pencari kerja (*job seeker*) menjadi pencipta lapangan kerja (*job creator*),
5. *Communicator*, mampu berkomunikasi dengan baik dalam bentuk penyampaian gagasan maupun solusi, mampu menyampaikan argumentasi/opini hukum, negosiasi.
6. *Professional*, mampu bertanggung jawab, memiliki integritas dan akuntabilitas sesuai etika profesi dan kapabilitas dalam menjalankan profesinya,
7. *Leader*, yaitu memiliki kemampuan bertindak yang bersifat solutif dalam berbagai situasi, dan memiliki kemampuan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

## **2. Deskripsi Lulusan**

Lulusan Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unniversitas Diponegoro merupakan sarjana hukum profesional dan bermoral yang berfikir progresif dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif (lokal, nasional, dan global), yang mempunyai Profil “**THE SEVEN STAR**” yaitu mempunyai kemampuan: *Law Policy Maker, Law Problem Solver, Negotiator, Entrepreneur, Communicator, Professional* dan *Leader*.

## **F. Capaian Pembelajaran Lulusan**

Program Sarjana Hukum diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama sesuai dengan profil lulusan Program Studi S-1 Ilmu Hukum yang telah disetujui oleh senat fakultas.

Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 6 (enam) dalam KKNi :

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk penulisan hukum atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk penulisan hukum atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman.

Adapun lulusan Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum akan memiliki peran dan fungsi sesuai dengan bidang keilmuan/ keahlian dari program studi yaitu meliputi:

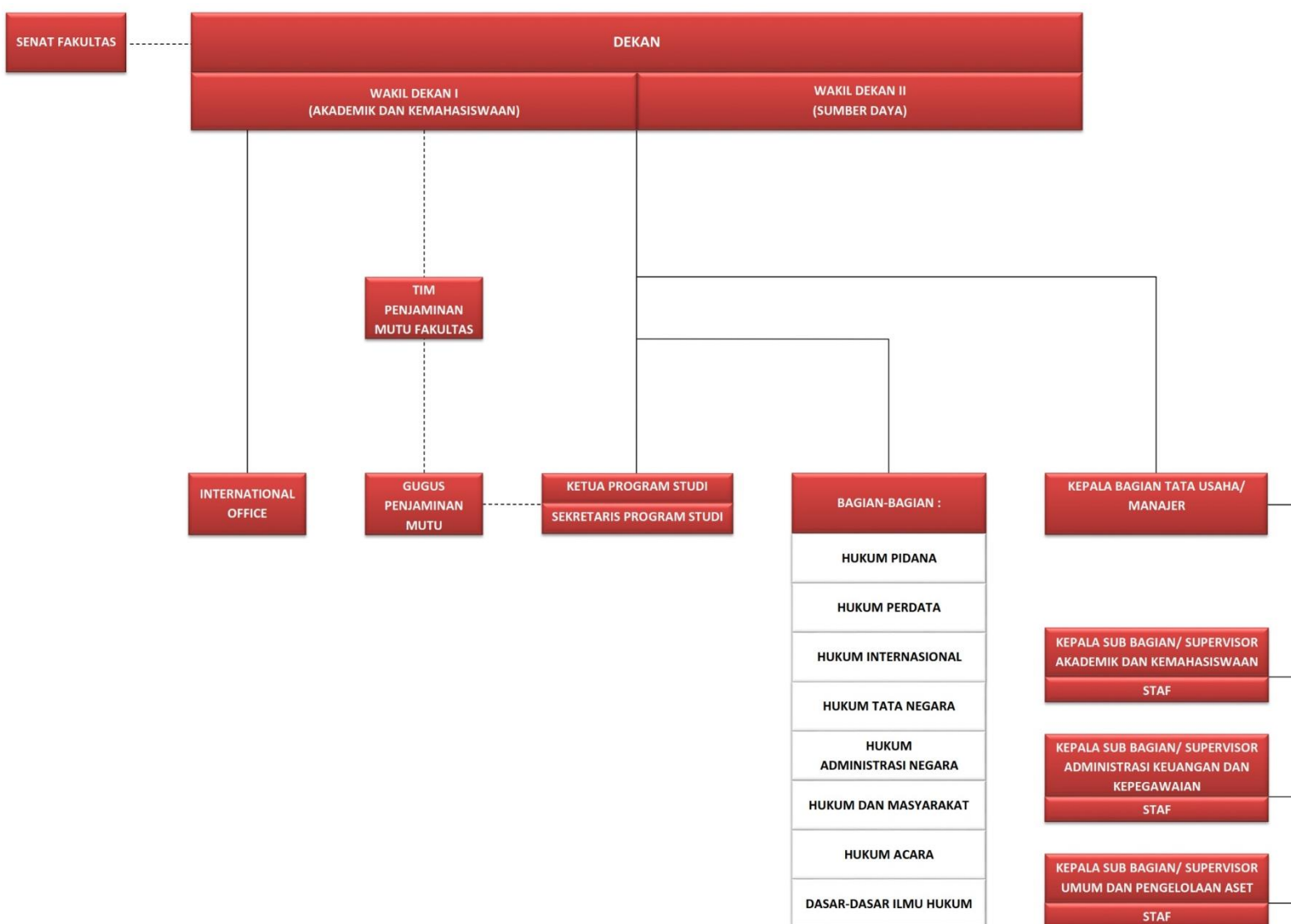
1. *Law Policy Maker*, mampu memahami pengetahuan hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum dan merancang produk peraturan perundangan dan kontrak-kontrak privat (nasional dan internasional), maupun perjanjian internasional,
2. *Law Problem Solver*, mampu memahami pengetahuan hukum berkaitan dengan kebijakan hukum dan memberikan solusi cerdas terhadap perkara-perkara hukum yang disengketakan dalam pengadilan maupun arbitrase,
3. *Negotiator*, mampu melakukan negosiasi perancangan kontrak dan perjanjian internasional serta perkara-perkara hukum di pengadilan,
4. *Entrepreneur*, mampu menciptakan bidang usaha sendiri sesuai profesi, sehingga mengubah *mindset* para lulusan dari pencari kerja (*job seeker*) menjadi pencipta lapangan kerja (*job creator*),
5. *Communicator*, mampu berkomunikasi dengan baik dalam bentuk penyampaian gagasan maupun solusi, mampu menyampaikan argumentasi/opini hukum, negosiasi.
6. *Professional*, mampu bertanggung jawab, memiliki integritas dan akuntabilitas sesuai etika profesi dan kapabilitas dalam menjalankan profesinya,
7. *Leader*, yaitu memiliki kemampuan bertindak yang bersifat solutif dalam berbagai situasi, dan memiliki kemampuan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

## G. Jenis Prodi

Perkembangan Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum tergolong sangat cepat, pertama untuk memenuhi tuntutan bagi para sarjana hukum di Kota Semarang. Di sisi lain sebagai upaya untuk menampung minat masyarakat yang ingin melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum Undip sementara daya tampung yang dapat diterima melalui SPMB sangat terbatas, maka pada tahun 1994/1995 Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip mulai membuka Program Non Reguler dengan waktu kuliah pada sore hari yang diprioritaskan bagi lulusan Program D III/Program Studi lain yang relevan (SK Rektor Undip

No.109/SK/PT09/1994 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program S1 Non Reguler di Lingkungan Fakultas Hukum Undip). Dalam perkembangannya, pada tahun akademik 1997/1998 Program Non Reguler Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menerima calon mahasiswa dengan persyaratan lulusan SLTA yang atas dasar tahun kelulusannya tidak diperkenankan lagi mengikuti SPMB. Sejak tahun akademik 2000/2001 Program Studi S-1 Ilmu Hukum Non Reguler mulai menerima mahasiswa baru lulusan SLTA terbaru maupun lulusan sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 Program S1 Ilmu Hukum membuka Program Kelas *International Undergraduate Program* (IUP) yang penyelenggaraan belajar-mengajarnya menggunakan bahasa Inggris dan dengan persyaratan mempunyai kemampuan dengan skor TOEFL 500.

## H. SOTK



## **I. Kemahasiswaan**

### **1. Pola Pengembangan Mahasiswa**

Sesuai dengan UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 155/ U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Dalam pelaksanaan tugas pengembangan kemahasiswaan sehari-hari di perguruan tinggi, ruang lingkup tugas pembimbingan kemahasiswaan dibatasi pada mahasiswa Diploma dan S1. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi, cakupan tugas pembinaan dan pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi dua kegiatan pokok, yakni kurikuler dan ekstra kurikuler.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggung jawab esensi mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh, bertaqwa, berkemampuan berpikir analitis dan kritis, berilmu tinggi, berketrampilan, bermoral dan berbudi pekerti luhur. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka arah dan tujuan pembinaan mahasiswa dikembangkan berdasarkan Pola Pengembangan dan Pembinaan Kemahasiswaan (POLBANGMAWA).

### **2. Pembinaan Mahasiswa**

Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan Fakultas Hukum diarahkan untuk mencapai sasaran terbentuknya tenaga akademik dan professional yang cendekiawan, mumouni dan berkepribadian Indonesia. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan yang diselenggarakan di Fakultas Hukum didasarkan pada konsep terpadu yang dinamis dan sejalan dengan usaha dan kebijakan pembangunan regional maupun nasional, dalam rangka ketahanan nasional yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan.

Bidang-bidang kegiatan dalam pembinaan dan pengembangan mahasiswa Fakultas Hukum Undip sebagai makhluk sosial yang mencakup segi-segi sosial, budaya, ekonomi, ideologi dan ketahanan nasional, kepemimpinan serta kesejahteraan yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bidang, yaitu :

### **3. Penalaran Mahasiswa**

Merupakan kegiatan yang mencakup pembinaan dan pengembangan sikap ilmiah dan sikap keahlian. Sikap ilmiah dimaksudkan untuk membentuk

tenaga ahli akademik dan profesional yang cendekiawan dan mampu melakukan analisis yang tajam, jujur, terbuka, cermat, tekun, disiplin, objektif, bebas dan bertanggung jawab.

Jenis-jenis kegiatan bidang penalaran antara lain meliputi penelitian institusional, seminar akademik, karya inovatif produktif, karya tulis dan pelaksanaan manajemen dan kepemimpinan.

#### **4. Minat, Bakat dan Kegemaran**

Minat, bakat dan kegemaran adalah kegiatan yang mencakup pembinaan dan pengembangan minat (*interest*), bakat (*talent*) dan kegemaran (*hobby*) guna meningkatkan semangat, kreativitas dan idealisme guna mendukung upaya peningkatan kemampuan penalaran dan profesionalisme mahasiswa (*intellectual quality*) dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi. Jenis-jenis kegiatan tersebut meliputi olah raga, seni, budaya, pelestarian lingkungan hidup, kepramukaan, bela negara dan penerbitan kampus.

#### **5. Kesejahteraan Mahasiswa**

Bidang kesejahteraan adalah kegiatan yang mencakup pembinaan dan pengembangan jiwa, kepribadian, keagamaan dan '*welfare*' mahasiswa berupa pelayanan, rangsangan, penyediaan fasilitas guna mendukung upaya peningkatan semangat kemampuan penghayatan mahasiswa dalam proses belajar-mengajar. Jenis-jenis kegiatan ini meliputi : kerohanian, bimbingan konseling, poliklinik, beasiswa, koperasi mahasiswa dan lain-lain.

Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa yang kurang mampu ekonominya, namun mempunyai prestasi akademik yang tinggi, Universitas Diponegoro memberikan fasilitas beasiswa yang antara lain bersumber dari :

##### **a. Pemerintah**

- 1) Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
- 2) Beasiswa Bidikmisi
- 3) Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi
- 4) Beasiswa Afirmasi Papua
- 5) Beasiswa Mahasiswa Unggulan CIMB Niaga
- 6) Beasiswa Mahasiswa Non Unggulan CIMB Niaga
- 7) Beasiswa Unggulan BNC BRI

##### **b. Yayasan/Lembaga:**

- 1) Yayasan Toyota dan Astra .
- 2) PT Bank Indonesia
- 3) Bhakti BCA
- 4) PT. Djarum
- 5) Eka Tjipta Foundation

- 6) Yayasan Sobat Bumi PERTAMINA
- 7) PT Indocement Tunggul Prakarsa
- 8) Yayasan Pelayanan Kasih A&A Rachmat (PT Daya Adicipta Motora)
- 9) Yayasan Salim
- 10) Karya Salemba Empat PT.Gas Negara
- 11) PT Samsung Electronics Indonesia
- 12) Tanoto Foundation
- 13) Yayasan Baitul Maal BRI
- 14) Cahaya Pintar PT PLN Persero.

## BAB II PROSES PENDIDIKAN

### A. Penerimaan Mahasiswa Baru

#### 1. Proses Penerimaan Mahasiswa Baru

Untuk Proses penerimaan Mahasiswa Baru dapat dilihat info dan pendaftaran di web [pmb.undip.ac.id](http://pmb.undip.ac.id)

#### 2. Registrasi Mahasiswa Baru

- a. Seorang calon mahasiswa Universitas Diponegoro mempunyai status resmi sebagai mahasiswa setelah dilantik pada upacara penerimaan mahasiswa baru (Untuk Mahasiswa Baru)



- b. Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.
  - (link biaya studi : <https://pmb.undip.ac.id/wp-content/uploads/2021/04/2021-Biaya-Studi-S1-dan-Diploma-Rev.pdf>)
  - Link cara pembayaran : <https://pmb.undip.ac.id/tata-cara-bayar-sarjana>
- c. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
  - Link <https://regonline.undip.ac.id/index.php/login>
- d. Setelah melakukan registrasi online mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan di Fakultas yang akan menjadi syarat untuk mengikuti ujian skripsi (Ujian Tahap Akhir) yaitu :
  - PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru)
  - Pendikar (Pendidikan Karakter)

#### 3. Registrasi Mahasiswa Lama

- a. melakukan pembayaran administrasi



b. reg-online

a) Sebelum memulai Registrasi

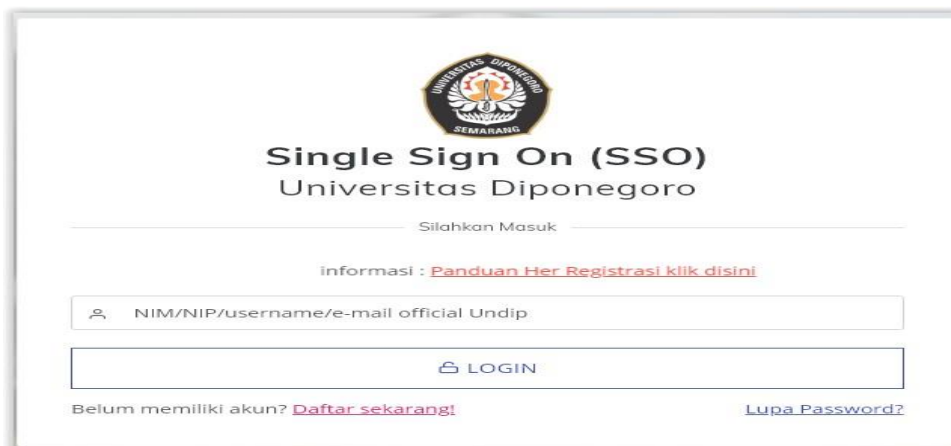
a) SIAP adalah kependekan dari Sistem Informasi Akademik, Penelitian dan Pengabdian.

b) Pastikan akun *Single Sign On* (SSO) Undip Anda sudah aktif. Untuk informasi mengenai SSO Undip, kunjungi [sso.undip.ac.id](https://sso.undip.ac.id).

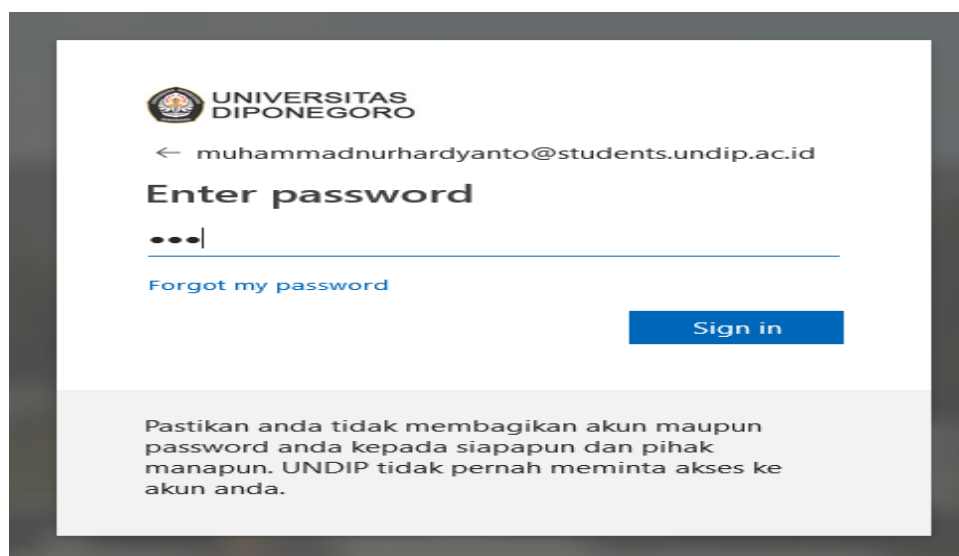
c) Her-registrasi hanya bisa dilakukan setelah Anda menyelesaikan/membayar biaya kuliah/UKT.

b) Langkah-langkah her-registrasi melalui SIAP Undip

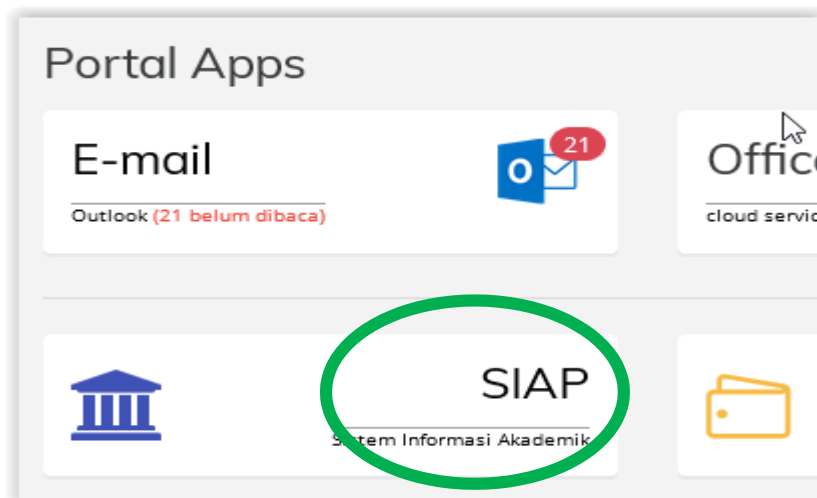
1. Buka website <https://sso.undip.ac.id> , kemudian masukan username.



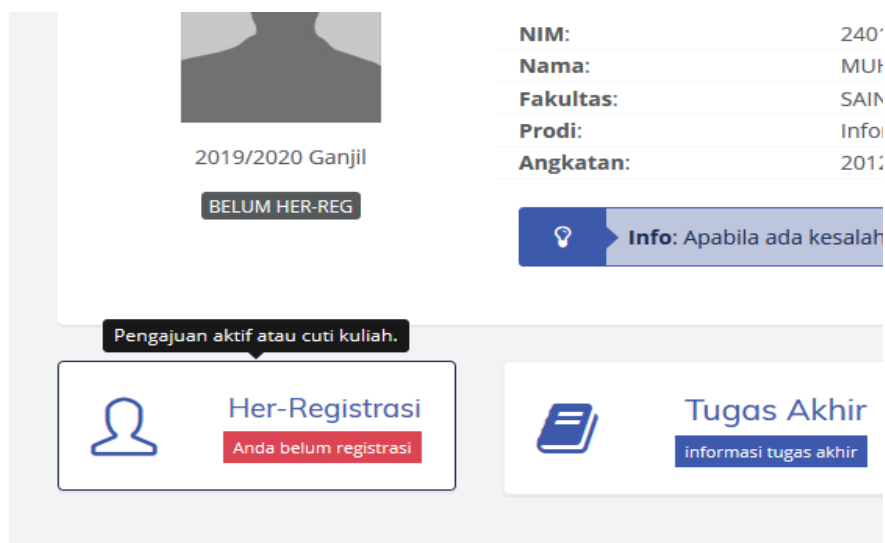
2. Login dengan email @students.undip.ac.id Anda, menggunakan password SSO Anda.



3. Pilih menu SIAP.



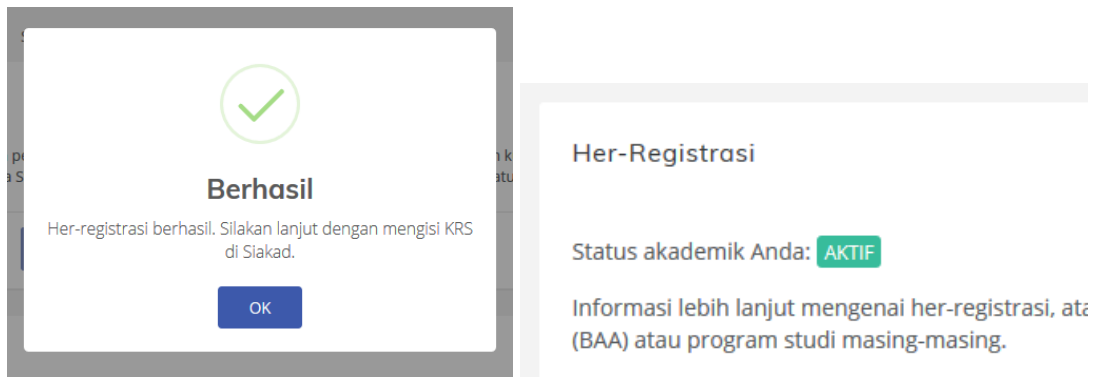
4. Pilih menu Her-Registrasi.



5. Klik pilihan “Saya akan aktif kuliah” jika Anda menyatakan akan aktif kuliah, atau klik “Ajukan usulan cuti” dan mengisi form yang ditampilkan jika Anda memutuskan untuk cuti kuliah.



6. Jika proses her-registrasi berhasil, maka status akademik Anda akan berubah menjadi Aktif.



7. Setelah proses her-registrasi, Anda dapat langsung melakukan pengisian KRS / IRS di dalam aplikasi SIADad (sia,undip.ac.id).



**Apabila mengalami kesulitan silahkan hubungi**

<https://helpdesk.undip.ac.id>

## B. Masa Studi Program S-1 Ilmu Hukum

### 1. Batas Maksimum Masa Studi dan Beban Studi

Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu kualitas lulusan Program studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum, Tim pengelola merancang kurikulum yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan perkuliahan. Program studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dirancang untuk masa studi selama 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) semester dengan batas maksimum 14 (empat belas) semester. Pada masa studi tersebut, para mahasiswa program studi S-1 Ilmu Hukum diharuskan

mengambil beban studi paling sedikit 144 ( seratus empat puluh empat ) SKS dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) SKS termasuk tugas akhir penulisan hukum.

## **2. Status Akademik Mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum**

Setiap semester pada program studi S-1 Ilmu Hukum memiliki pengelompokan status akademik mahasiswa kedalam beberapa kelompok yaitu :

### **a) Aktif**

Status ini berlaku bagi mahasiswa yang melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan perkuliahan hingga lulus dari program studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum.

### **b) Cuti Akademik**

Cuti akademik pada program studi S-1 Ilmu Hukum dikualifikasikan kedalam dua jenis yaitu cuti akademik dan cuti akademik dengan alasan khusus. cuti akademik dengan alasan khusus yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau selama-lamanya 2 (dua) semester berturut-turut dengan persetujuan Dekan karena halangan yang tidak dapat dihindari. Sedangkan cuti akademik tanpa keterangan adalah tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau selama-lamanya 2 (dua) semester berturut-turut dengan persetujuan Dekan karena keinginan mahasiswa.

Permohonan cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa program studi S-1 Ilmu Hukum yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester. Sedangkan pengajuan permohonan cuti akademik dengan alasan khusus hanya dapat diberikan kepada mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena melahirkan, melaksanakan tugas negara, tugas universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik

Mahasiswa program studi S-1 Ilmu Hukum yang mengambil cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi dalam kegiatan pendidikan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sehingga mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik apapun selama masa cuti. Namun pengajuan permohonan cuti tidak diperkenankan dan tidak dibenarkan dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).

Persetujuan cuti akademik hanya dapat diterbitkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam bentuk Surat Izin. Dalam memberikan persetujuan cuti, Dekan akan menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Sumber Daya Universitas Diponegoro. Surat izin cuti yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum akan ditindaklanjuti oleh operator sistem fakultas (Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan) untuk memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administratif berakhir

Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan sebelum pelaksanaan registrasi administratif, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik fakultas dan dilampiri oleh beberapa dokumen antara lain :

- a. transkrip akademik;
- b. bukti pembayaran SPP/ UKT terakhir;
- c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); dan
- d. dokumen pendukung.

Mahasiswa program studi S-1 Ilmu Hukum yang dinyatakan berstatus cuti oleh Sub Bagian akademik Fakultas Hukum melalui Surat Izin dari Dekan, tetap dikenakan kewajiban membayar biaya pendidikan sebesar 50 (lima puluh) persen dari biaya pendidikan per semester. Apabila mahasiswa pemohon telah memperoleh izin cuti, namun tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, maka izin cuti dibatalkan oleh dan status pemohon berubah menjadi mahasiswa tidak aktif (mangkir).

Ketentuan permohonan pengajuan cuti tidak dapat diterapkan dan dianggap tidak berlaku bagi Mahasiswa program studi S-1 Ilmu Hukum yang sedang menjalani hukuman penjara/hukuman skorsing.

#### **c) Mangkir (tidak aktif)**

Mangkir (tidak aktif) adalah status akademik bagi mahasiswa program S-1 Ilmu Hukum yang tidak melakukan registrasi administratif dan/ atau registrasi akademik. Masa studi mahasiswa yang mangkir (tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik ) dianggap tetap diperhitungkan oleh Pengelola program studi. Kewajiban pembayaran biaya akademik sebesar 100 % (seratus persen) dikenakan kepada mahasiswa yang bersangkutan selama semester mangkir. Bagi mahasiswa program studi S-1 Ilmu Hukum yang bertatus tidak aktif (mangkir) selama 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dekan Fakultas Universitas Diponegoro No. 127/UN7.5.1/HK/2020.

#### **d). Pindah Studi**

Pindah studi adalah perubahan status mahasiswa yang melakukan perpindahan dari satu program studi ke program studi lain dalam lingkungan Universitas Diponegoro, keluar dari Universitas Diponegoro maupun pindahan dari PTN dari dalam maupun luar negeri ke Universitas Diponegoro.

Perpindahan studi mahasiswa kedalam lingkungan program studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat dilakukan dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Dekan No. 127/UN7.5.1/HK/2020 antara lain :

- a. Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan akademik paling sedikit 2 (dua) semester berturut-turut;
- b. Perpindahan mahasiswa yang bersangkutan bukan dikareankan oleh pelanggaran tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis;
- c. mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus placement test;
- d. Perpindahan mahasiswa yang bersangkutan disetujui oleh fakultas baik fakultas asal maupun fakultas yang dituju, melalui pertimbangan Ketua Program Studi, dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan/atau hasil pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau sisa masa studi;
- e. pengajuan permohonan pindah studi diajukan oleh mahasiswa paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap sesuai dengan kalender akademik.

Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/ departemen/program studi yang dituju. Tata cara pengajuan permohonan pindah studi di Program S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tercantum pada penjelasan Peraturan Dekan No. 127 /UN7.5.1/HK/2020. Namun pengajuan perpindahan program studi hanya diizinkan satu kali.

Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum program studi yang sudah diikuti;
- b. apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam butir a, namun dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan

Selain menerima perpindahan mahasiswa dari luar Program Studi S-1 Ilmu Hukum baik program studi dalam lingkungan Universitas Diponegoro maupun universitas lain di Indonesia, Pihak Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri di setiap awal semester gasal sebagaimana diatur dalam pasal 44 Peraturan Dekan No. 127/UN7.5.1/HK/2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal dimulai. Bagi mahasiswa WNA (warga negara asing) dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik;
- c. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account*;
- d. fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
- e. surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;
- f. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- g. pasfoto terbaru;
- h. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang; dan
- i. surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

**e). Putus Studi**

Status akademik putus studi pada mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum, bilamana memenuhi sejumlah ketentuan di bawah ini:

- 1) tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi hasil belajar sebagaimana tersebut pada Pasal 34;
- 2) dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan (baik kesehatan fisik maupun mental) dari tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan universitas;
- 3) mendapat sanksi atas pelanggaran akademik berat;
- 4) mendapat keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.

Mahasiswa yang hendak mengundurkan diri mengajukan surat permohonan undur diri yang disetujui orang tua, diketahui Pembimbing Akademik/Ketua Program Studi ditujukan kepada Dekan. Kemudian Dekan mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan Keputusan Rektor Undip tentang undur diri. Apabila dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak laik lanjut studi mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan undur diri, maka Rektor menerbitkan Keputusan Rektor Undip tentang pemutusan hubungan studi.

**C. Beban Studi**

Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar. Masa studi adalah batas untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya. Program pendidikan Sarjana Hukum pada

Program Sarjana Hukum dari SMA atau sederajat dirancang paling lama 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) semester dengan beban belajar paling sedikit 145 (seratus empat puluh lima) sks dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) sks termasuk tugas akhir atau penulisan hukum. Mahasiswa Program Sarjana Hukum wajib mengambil paket beban studi paling banyak 22 (dua puluh dua) sks pada semester pertama. Beban studi tugas akhir atau skripsi adalah 4 (empat) sks. Dekan dapat mengusulkan kegiatan/sejumlah kegiatan yang dapat disetarakan dengan tugas akhir atau skripsi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Rektor.

(5) Kegiatan yang dapat disetarakan sebagaimana disebut dalam ayat (4) meliputi prestasi dalam kejuaraan tingkat nasional dan internasional, penemuan karya ilmiah yang luar biasa, dan kegiatan wirausaha dalam bidang yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi.

#### D. Penilaian (Mata Kuliah dan Tugas Akhir)

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup aspek *hardskill* dan *softskill* yang dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. ujian tertulis, ujian lisan dan/atau keterampilan, serta portofolio;
  - b. tugas akhir bisa dalam bentuk skripsi, atau bentuk lain yang setara antara lain;
  - c. Berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain;
  - d. bobot komponen penilaian hasil belajar yang berdasarkan studi kasus (*case method*) *project-based learning* minimal 50 (lima puluh) persen.
2. Sistem penilaian :
  - a. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, B, C, D, dan E;
  - b. nilai lulus minimal tugas akhir/ skripsi adalah B;
  - c. untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut :

| Rentang Nilai Angka | Nilai Huruf | Bobot Nilai Huruf |
|---------------------|-------------|-------------------|
| $\geq 80$           | A           | 4,00              |
| 70 – 79,99          | B           | 3,00              |
| 60 – 69,99          | C           | 2,00              |
| 51 – 59,99          | D           | 1,00              |
| $\leq 50,99$        | E           | 0,00              |

- d. mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah, apabila mendapat nilai minimal C;
- e. Mahasiswa yang mendapat nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester reguler atau semester antara;
- f. mahasiswa yang mendapat nilai D, C dan B dapat melakukan perbaikan pada semester reguler atau remidi pada semester berjalan, dan nilai yang dipakai adalah nilai yang terbaik;



- g. mahasiswa yang telah melakukan remidi 3 (tiga) kali dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta telah menyelesaikan penugasan yang diberikan berhak mendapatkan nilai ujian minimal C yang ditetapkan oleh ketua program studi;
  - h. jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai TL yang berarti “Tidak Lengkap” dengan nilai bobot nol (0). Apabila sampai dengan pengisian IRS semester berikutnya nilai masih berstatus TL, mahasiswa tersebut dianggap tidak lulus (E);
3. Nilai akhir mata kuliah hasil belajar didasarkan pada beberapa komponen penilaian dan dituangkan dalam rumus yang ditetapkan oleh program studi:
- a. Mata Kuliah studi kasus (*case method*) *project-based learning*:
    - Presentase Nilai Tugas : 50%
    - Presentase Nilai Ujian Tengah Semester : 25%
    - Presentase Nilai Ujian Akhir Semester : 25%
  - b. Mata Kuliah selain studi kasus (*case method*) *project-based learning*:
    - Presentase Nilai Tugas : 20%
    - Presentase Nilai Ujian Tengah Semester : 30%
    - Presentase Nilai Ujian Akhir Semester : 50%

Presentase penilaian untuk mata kuliah selain studi kasus (*case method*) *project-based learning* dapat diubah sesuai dengan kesepakatan dosen penguji dengan mahasiswa dengan mengajukan usulan perubahan presentase tersebut melalui sistem informasi akademik dan harus disetujui oleh Program Studi.

- 4. Nilai akhir Tugas Akhir - Penulisan Hukum terdiri dari:
  - a. Penilaian atas substansi Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan 60% bobot penilaian.
  - b. Penilaian ujian Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan 40% bobot penilaian.
- 5. Penilaian ujian akhir Tugas Akhir - Penulisan Hukum didasarkan pada nilai rata-rata yang diberikan oleh setiap penguji.

## **E. Evaluasi Hasil Belajar**

Evaluasi Hasil Belajar adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi. Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis dan/atau ujian lisan. Ujian dapat diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir/skripsi.

### **1. Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana Dari SMA Atau Sederajat**

- a. Tahap I dilakukan pada akhir semester 3 (tiga) dengan ketentuan:

- 1) telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dievaluasi untuk memenuhi syarat pada pelaksanaan TOEFL;
  - 2) mampu mengumpulkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) sks dengan  $IPK \geq 2,50$  (dua koma lima nol);
  - 3) apabila mampu mengumpulkan  $> 35$  (tiga puluh lima) sks, tetapi  $IPK < 2,50$  (dua koma lima nol) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 35 (tiga puluh lima) sks dengan  $IPK \geq 2,50$  (dua koma lima nol).
- b. Tahap II dilakukan pada akhir semester 7 (tujuh) dengan ketentuan:
- 1) mampu mengumpulkan paling sedikit 85 (delapan puluh lima) sks dengan  $IPK \geq 2,75$  (dua koma tujuh lima);
  - 2) apabila mampu mengumpulkan  $> 85$  (delapan puluh lima) sks, tetapi  $IPK < 2,75$  (dua koma tujuh lima) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 85 (delapan puluh lima) sks dengan  $IPK \geq 2,75$  (dua koma tujuh lima).
- c. Tahap III dilakukan pada akhir program
- Selambat-lambatnya pada akhir semester 14 (empat belas), mahasiswa harus sudah mengumpulkan dan lulus semua beban sks yang ditetapkan untuk program sarjana dan  $IPK \geq 2,00$  (dua koma nol nol).

## **2. Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana Lintas Jalur**

- a. Tahap I dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan:
- 1) mampu mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dengan  $IPK \geq 2,25$  (dua koma dua lima);
  - 2) apabila mampu mengumpulkan lebih dari 20 (dua puluh) sks, tetapi  $IPK < 2,25$  (dua koma dua lima) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 20 (dua puluh) sks dengan  $IPK \geq 2,25$  (dua koma dua lima).
- b. Tahap II dilakukan pada akhir semester 4 (empat) dengan ketentuan:
- 1) mampu mengumpulkan paling sedikit 40 (empat puluh) sks dengan  $IPK \geq 2,25$  (dua koma dua lima);
  - 2) apabila mampu mengumpulkan lebih dari 40 (empat puluh) sks, tetapi  $IPK < 2,25$  (dua koma dua lima) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 40 (empat puluh) sks dengan  $IPK \geq 2,25$  (dua koma dua lima).
- c. Tahap III dilakukan pada akhir program
- Selambat-lambatnya pada semester 6 (enam), mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program sarjana berjenjang dan  $IPK \geq 2,00$  (dua koma nol nol).

Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi seperti ketentuan di atas, dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademik. Mahasiswa disarankan untuk mengajukan surat permohonan undur diri kepada Rektor melalui Dekan. Universitas akan menerbitkan Keputusan Rektor Undip tentang pengunduran diri mahasiswa dari salah satu program studi. Apabila mahasiswa tidak mengajukan permohonan undur diri, pihak

universitas akan menerbitkan Keputusan Rektor Undip tentang pemutusan hubungan studi. Tata cara pengajuan undur diri tercantum pada Lampiran Peraturan Rektor.

## F. Penentuan Kelulusan dan Wisuda

### 1. Kelulusan Mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum

Mahasiswa program studi S-1 Ilmu Hukum dinyatakan lulus studi berdasarkan penetapan kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penetapan kelulusan dapat diselenggarakan melalui yudisium di tingkat program studi S-1 Ilmu Hukum. Kelulusan mahasiswa program studi S-1 Ilmu Hukum ditentukan oleh sejumlah persyaratan antara lain:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan telah lulus ujian tugas akhir/penulisan hukum di depan penguji atau tim penguji;
- b. Dalam menyelesaikan penulisan hukum, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengikuti program magang yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga yang bersangkutan;
- c. Peraturan lebih lanjut mengenai magang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan;
- d. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyerahkan revisi tugas akhir/penulisan hukum yang lolos dari deteksi anti plagiarisme dengan aplikasi tertentu;
- e. Mahasiswa yang bersangkutan berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas;
- f. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/ laboratorium yang dipinjam;
- g. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki);
- h. Mahasiswa yang bersangkutan telah mengunggah ringkasan dari tugas akhir/penulisan hukum pada repository Undip.

Bagi Mahasiswa yang tidak menyerahkan revisi dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan ujian tugas akhir/penulisan hukum, maka wajib mengikuti ujian ulang. Predikat kelulusan yang diberikan kepada mahasiswa terdiri dari :

| No. | INDEKS PRESTASI KUMULATIF | PREDIKAT LULUSAN |
|-----|---------------------------|------------------|
| 1.  | 2,76-3,00                 | Memuaskan        |
| 2.  | 3,01- 3,50                | Sangat Memuaskan |
| 3.  | 3,51-4,00                 | Cumlaude         |

Catatan : Khusus untuk pemberian predikat kelulusan “*pujian*” (*cumlaude*) ditentukan dengan memperhatikan masa studi terjadwal (n semester) ditambah 1 (satu) semester.

Rektor akan memberikan piagam penghargaan kepada lulusan program studi S-1 Ilmu Hukum yang meraih predikat “*pujian*” (*cumlaude*).

## **2. Upacara Yudisium dan Wisuda**

Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib mengikuti upacara yudisium dan penglepasan calon wisudawan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum. Penyelenggaraan upacara yudisium dan penglepasan calon wisudawan sesuai dengan periodisasi wisuda Universitas Diponegoro.

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan sarjana pada program studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diwajibkan untuk mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya, atau selambat-lambatnya 1 (satu) periode wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus. Upacara wisuda akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali periode kelulusan dalam satu tahun oleh Universitas Diponegoro.

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari program S-1 (sarjana) Ilmu Hukum akan mendapatkan ijazah, transkrip akademik, SKPI dan kartu ucapan selamat dari Rektor Universitas Diponegoro. Gelar Sarjana Hukum adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Fakultas Hukum Undip yang telah dinyatakan lulus pendidikan akademik program sarjana Ilmu Hukum. Jenis dan sebutan gelar akademik serta singkatannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Undip.

## BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### A. Perkuliahan

#### 1. IRS (Isian Rencana Studi)

Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu. Pengisian IRS merupakan bagian dari registrasi akademik melalui SIMAK secara online sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut.

Isian rencana studi (IRS) wajib diisi oleh mahasiswa, setelah mendapatkan arahan, pertimbangan dan persetujuan dari pembimbing akademik untuk memilih mata kuliah yang akan diambil. Persetujuan Isian Rencana Studi (IRS) diberikan oleh pembimbing akademik dalam sistem aplikasi SIMAK. Apabila pembimbing akademik berhalangan melaksanakan tugas, Ketua program studi mengambil alih sementara tugas pembimbing akademik, namun untuk persetujuan IRS dilakukan oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.

Pengambilan Jumlah SKS disesuaikan dengan IPS pada semester terakhir mahasiswa tersebut aktif; Jumlah SKS maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa pada setiap semester adalah sebagai berikut:

| IPS pada semester sebelumnya | SKS maksimum yang dapat diambil |
|------------------------------|---------------------------------|
| < 2,00                       | 18                              |
| 2,00 – 2,49                  | 20                              |
| 2,50 – 2,99                  | 22                              |
| ≥ 3,00                       | 24                              |

IRS tidak akan disetujui oleh pembimbing akademik apabila mahasiswa:

- mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
- mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum terpenuhi;
- mengambil SKS melebihi jumlah SKS yang diperbolehkan;
- mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.

Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan; Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.

Penggantian mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai; Pembatalan mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya pada akhir minggu ke-4 (empat) setelah kegiatan perkuliahan dimulai. Penggantian maupun pembatalan mata kuliah harus mendapatkan persetujuan Pembimbing Akademik.

## 2. Kurikulum

Kurikulum yang berlaku dan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar pada program studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terbagi ke dalam dua jenis kurikulum yaitu kurikulum 2017 dan kurikulum 2020.

Definisi kurikulum dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 15 Tahun 2017 jo Pasal 1 angka 25 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

### • Kurikulum tahun 2017

Pada kurikulum tahun 2017, fokus utama kurikulum program sarjana dirancang untuk mencetak lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran minimal, yaitu setara dengan jenjang 6 (enam) kualifikasi pada KKNI. Kurikulum program sarjana dilaksanakan berbasis kompetensi capaian pembelajaran lulusan yang memuat rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus setara dengan jenjang 6 (enam) kualifikasi pada KKNI.

Penyelenggaraan proses pembelajaran diutamakan dengan metode *Student Centered Learning* (SCL):

- a. *Problem-based learning*;
- b. *Interactive skill station information and technology*;
- c. *Task-based learning*.

Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun oleh senat fakultas. Penetapan kurikulum diatur dalam Keputusan Rektor Undip setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas.

Struktur kurikulum tahun 2017 program studi Sarjana Ilmu Hukum terdiri atas:

- a. *mata kuliah wajib* adalah mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama;
- b. *mata kuliah pilihan* adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau luar program studinya untuk memperluas wawasan dan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan.

Mata kuliah wajib nasional terdiri atas Pendidikan Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan. Sedangkan Mata kuliah wajib universitas terdiri atas: Bahasa Inggris, Olah Raga, Kewirausahaan, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Tugas Akhir. Ruang lingkup mata kuliah pilihan meliputi: Pertama, sekumpulan mata kuliah yang terdapat dalam kelompok mata kuliah peminatan lain. Kedua, sekumpulan mata kuliah yang dipilih dari berbagai program studi/fakultas lain;

Mata kuliah wajib pada suatu program studi harus sama, baik kelas reguler, kelas internasional, maupun kelas Kerjasama Setiap mahasiswa program sarjana wajib lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan yang tercakup dalam struktur kurikulum program studi. Setiap mahasiswa dapat memilih perpaduan antara:

- a. mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan pada program studi tersebut; atau
- b. mata kuliah wajib dan mata kuliah yang dipilih dari berbagai program studi/fakultas lain.

Perpaduan apapun yang dipilih oleh mahasiswa, jumlah sks yang boleh diambil harus dalam batas beban studi untuk program sarjana. Beban ekuivalen dalam bentuk sks untuk mata kuliah wajib program studi tidak termasuk tugas akhir/skripsi. Beban ekuivalen dalam bentuk sks untuk mata kuliah pilihan paling sedikit 12 (dua belas) sks dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.

Persebaran mata kuliah pada kurikulum tahun 2017 untuk program studi dalam tiap semesternya sebagai berikut:

**KURIKULUM 2017**

| SEMESTER   | KODE      | MATA KULIAH               | SKS |
|------------|-----------|---------------------------|-----|
| 1          | UNW00-001 | Pendidikan Agama          | 2   |
| 1          | UNW00-003 | Kewarganegaraan           | 2   |
| 1          | UNW00-002 | Pancasila                 | 2   |
| 1          | UNW00-005 | Olah Raga                 | 1   |
| 1          | HIH21-210 | Ilmu Negara               | 3   |
| 1          | UNW00-004 | Bahasa Indonesia          | 2   |
| 1          | UNW00-006 | Bahasa Inggris (Hukum)    | 2   |
| 1          | HIH21-211 | Pengantar Ilmu Hukum      | 4   |
| 1          | HIH21-212 | Pengantar Hukum Indonesia | 4   |
| JUMLAH SKS |           |                           | 22  |

| SEMESTER   | KODE      | MATA KULIAH                | SKS |
|------------|-----------|----------------------------|-----|
| 2          | HIH21-220 | Hukum Konstitusi           | 2   |
| 2          | HIH21-221 | Hukum Perdata              | 4   |
| 2          | HIH21-222 | Asas-Asas Hukum Pidana     | 3   |
| 2          | HIH21-223 | Hukum Administrasi Negara  | 4   |
| 2          | HIH21-224 | Hukum Tata Negara          | 4   |
| 2          | HIH21-225 | Hukum Islam                | 4   |
| 2          | HIH21-226 | Sosiologi dan Budaya Dasar | 2   |
| JUMLAH SKS |           |                            | 23  |

| SEMESTER   | KODE      | MATA KULIAH                   | SKS |
|------------|-----------|-------------------------------|-----|
| 3          | UNW00-007 | Kewirausahaan                 | 2   |
| 3          | HIH21-230 | Hukum Adat                    | 2   |
| 3          | HIH21-231 | Hukum Bisnis                  | 3   |
| 3          | HIH21-232 | Hukum Pidana                  | 3   |
| 3          | HIH21-233 | Hukum Ketenagakerjaan         | 2   |
| 3          | HIH21-234 | Hukum Jaminan                 | 2   |
| 3          | HIH21-235 | Hukum dan Masyarakat          | 2   |
| 3          | HIH21-236 | Hukum Otonomi Daerah dan Desa | 2   |
| 3          | HIH21-237 | Hukum Pajak                   | 2   |
| 3          | HIH21-238 | Hukum Agraria                 | 3   |
| JUMLAH SKS |           |                               | 23  |

| SEMESTER   | KODE      | MATA KULIAH                       | SKS |
|------------|-----------|-----------------------------------|-----|
| 4          | HIH21-240 | Hukum Lingkungan                  | 2   |
| 4          | HIH21-241 | Hukum Perusahaan                  | 2   |
| 4          | HIH21-242 | Hukum Internasional               | 4   |
| 4          | HIH21-243 | Hukum Waris Perdata               | 2   |
| 4          | HIH21-244 | Hukum Hak Kekayaan Intelektual    | 2   |
| 4          | HIH21-245 | Perancangan Hukum                 | 2   |
| 4          | HIH21-246 | Hukum Pelayanan Publik            | 2   |
| 4          | HIH21-247 | Hukum Keakerabatan dan Waris Adat | 2   |
| 4          | HIH21-248 | Hukum Pidana Khusus               | 2   |
| 4          | HIH21-249 | Hukum Perjanjian                  | 2   |
| 4          | HIH21-250 | Kriminologi                       | 2   |
| JUMLAH SKS |           |                                   | 24  |

| SEMESTER   | KODE      | MATA KULIAH                      | SKS |
|------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 5          | HIH21-251 | Hukum Acara Perdata              | 3   |
| 5          | HIH21-252 | Hukum Acara Pidana               | 3   |
| 5          | HIH21-253 | Hukum Acara Tata Usaha Negara    | 3   |
| 5          | HIH21-254 | Etika dan Tanggung Jawab Profesi | 2   |
| 5          | HIH21-255 | Hukum Laut Internasional         | 2   |
| 5          | HIH21-256 | Hukum Perjanjian Internasional   | 2   |
| 5          | HIH21-257 | Hukum dan Hak Asasi Manusia      | 2   |
| 5          | HIH21-258 | Filsafat Hukum                   | 2   |
| 5          | HIH21-259 | Argumentasi Hukum                | 2   |
| 5          | HIH21-260 | Hukum Pidana Internasional       | 2   |
| JUMLAH SKS |           |                                  | 23  |

| SEMESTER   | KODE      | MATA KULIAH                           | SKS |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----|
| 6          | HIH21-261 | Upaya Hukum Perkara Tata Usaha Negara | 2   |
| 6          | HIH21-262 | Hukum Acara Pidana Khusus             | 2   |
| 6          | HIH21-263 | Upaya Hukum Perkara Perdata           | 2   |
| 6          | HIH21-264 | Metode Penelitian dan Penulisan Hukum | 2   |
| 6          | UNW00-008 | Kuliah Kerja Nyata                    | 3   |
| 6          |           | Wajib Bagian                          | 8   |
| 6          |           | Pilihan Bagian                        | 4   |
| JUMLAH SKS |           |                                       | 23  |

| SEMESTER   | KODE      | MATA KULIAH                 | SKS |
|------------|-----------|-----------------------------|-----|
| 7          | HIH21-270 | Kemahiran Litigasi          | 2   |
| 7          | HIH21-271 | Kerja Praktek & Tugas Akhir | 4   |
| JUMLAH SKS |           |                             | 6   |

- **Kurikulum Tahun 2020**

Pada kurikulum tahun 2020, program sarjana dirancang untuk mencetak lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran minimal, yaitu setara dengan jenjang 6 (enam) kualifikasi pada KKNI. Kurikulum program sarjana dilaksanakan berbasis kompetensi capaian pembelajaran lulusan yang memuat rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus setara dengan jenjang 6 (enam) kualifikasi pada KKNI.



Kurikulum akan dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun oleh program studi. Kurikulum ditetapkan dalam Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas. Pada kondisi mata kuliah tidak dapat diselenggarakan karena hal tertentu, dan digantikan dengan kegiatan lain, Dekan berkewajiban melakukan konversi atas kegiatan yang diselenggarakan tersebut ke dalam mata kuliah sesuai jumlah sks nya.

Persebaran mata kuliah pada kurikulum tahun 2020 atau kurikulum kampus merdeka untuk program studi dalam tiap semesternya sebagai berikut:

**KURIKULUM KAMPUS MERDEKA PRODI S-1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNDIP TAHUN 2020**

| SEMESTER | KODE     | MATA KULIAH                   | SKS       |
|----------|----------|-------------------------------|-----------|
| 1        |          | Pendidikan Agama              | 2         |
|          | UUW00011 | Pendidikan Agama Islam        |           |
|          | UUW00021 | Pendidikan Agama Kristen      |           |
|          | UUW00031 | Pendidikan Agama Katolik      |           |
|          | UUW00041 | Pendidikan Agama Hindu        |           |
|          | UUW00051 | Pendidikan Agama Budha        |           |
|          | UUW00061 | Pendidikan Agama Kong Hu Chu  |           |
| 1        | UUW00003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3         |
| 1        | UUW00004 | Bahasa Indonesia              | 2         |
| 1        | UUW00006 | Internet Of Think             | 2         |
| 1        | UUW00007 | Bahasa Inggris (Hukum)        | 2         |
| 1        | PHIH6210 | Ilmu Negara                   | 3         |
| 1        | PHIH6211 | Pengantar Ilmu Hukum          | 4         |
| 1        | PHIH6212 | Pengantar Hukum Indonesia     | 4         |
|          |          | <b>JUMLAH SKS</b>             | <b>22</b> |

| SEMESTER | KODE     | MATA KULIAH                | SKS       |
|----------|----------|----------------------------|-----------|
| 2        | PHIH6220 | Hukum Konstitusi           | 2         |
| 2        | PHIH6221 | Hukum Perdata              | 4         |
| 2        | PHIH6222 | Asas-Asas Hukum Pidana     | 3         |
| 2        | PHIH6223 | Hukum Administrasi Negara  | 4         |
| 2        | PHIH6224 | Hukum Tata Negara          | 4         |
| 2        | PHIH6225 | Hukum Islam                | 4         |
| 2        | PHIH6226 | Sosiologi dan Budaya Dasar | 2         |
| 2        | UUW00005 | Olah Raga                  | 1         |
|          |          | <b>JUMLAH SKS</b>          | <b>24</b> |

| SEMESTER   | KODE     | MATA KULIAH                   | SKS |
|------------|----------|-------------------------------|-----|
| 3          | UUW00008 | Kewirausahaan                 | 2   |
| 3          | PHIH6230 | Hukum Adat                    | 2   |
| 3          | PHIH6231 | Hukum Bisnis                  | 3   |
| 3          | PHIH6232 | Hukum Pidana                  | 3   |
| 3          | PHIH6233 | Hukum Ketenagakerjaan         | 2   |
| 3          | PHIH6234 | Hukum Jaminan                 | 2   |
| 3          | PHIH6235 | Hukum dan Masyarakat          | 2   |
| 3          | PHIH6236 | Hukum Otonomi Daerah dan Desa | 2   |
| 3          | PHIH6237 | Hukum Pajak                   | 2   |
| 3          | PHIH6238 | Hukum Agraria                 | 3   |
| JUMLAH SKS |          |                               | 23  |

| SEMESTER   | KODE     | MATA KULIAH                      | SKS |
|------------|----------|----------------------------------|-----|
| 4          | PHIH6240 | Hukum Lingkungan                 | 2   |
| 4          | PHIH6241 | Hukum Perusahaan                 | 2   |
| 4          | PHIH6242 | Hukum Internasional              | 4   |
| 4          | PHIH6243 | Hukum Waris Perdata              | 2   |
| 4          | PHIH6244 | Hukum Hak Kekayaan Intelektual   | 2   |
| 4          | PHIH6245 | Perancangan Hukum                | 2   |
| 4          | PHIH6246 | Hukum Pelayanan Publik           | 2   |
| 4          | PHIH6247 | Hukum Kekebabatan dan Waris Adat | 2   |
| 4          | PHIH6248 | Hukum Pidana Khusus              | 2   |
| 4          | PHIH6249 | Hukum Perjanjian                 | 2   |
| 4          | PHIH6250 | Kriminologi                      | 2   |
| JUMLAH SKS |          |                                  | 24  |

| SEMESTER   | KODE     | MATA KULIAH                      | SKS |
|------------|----------|----------------------------------|-----|
| 5          | PHIH6251 | Hukum Acara Perdata              | 3   |
| 5          | PHIH6252 | Hukum Acara Pidana               | 3   |
| 5          | PHIH6253 | Hukum Acara Tata Usaha Negara    | 3   |
| 5          | PHIH6254 | Etika dan Tanggung Jawab Profesi | 2   |
| 5          | PHIH6255 | Hukum Laut Internasional         | 2   |
| 5          | PHIH6256 | Hukum Perjanjian Internasional   | 2   |
| 5          | PHIH6257 | Hukum dan Hak Asasi Manusia      | 2   |
| 5          | PHIH6258 | Filsafat Hukum                   | 2   |
| 5          | PHIH6259 | Argumentasi Hukum                | 2   |
| 5          | PHIH6260 | Hukum Pidana Internasional       | 2   |
| JUMLAH SKS |          |                                  | 23  |

| SEMESTER   | KODE     | MATA KULIAH                           | SKS |
|------------|----------|---------------------------------------|-----|
| 6          | PHIH6261 | Upaya Hukum Perkara Tata Usaha Negara | 2   |
| 6          | PHIH6262 | Hukum Acara Pidana Khusus             | 2   |
| 6          | PHIH6263 | Upaya Hukum Perkara Perdata           | 2   |
| 6          | PHIH6264 | Metode Penelitian dan Penulisan Hukum | 2   |
| 6          | UUW00009 | Kuliah Kerja Nyata                    | 3   |
| 6          |          | Wajib Bagian                          | 8   |
| 6          |          | Pilihan Bagian                        | 4   |
| JUMLAH SKS |          |                                       | 23  |

| SEMESTER   | KODE     | MATA KULIAH                 | SKS |
|------------|----------|-----------------------------|-----|
| 7          | PHIH6270 | Kemahiran Litigasi          | 2   |
| 7          | PHIH6271 | Kerja Praktek & Tugas Akhir | 4   |
| JUMLAH SKS |          |                             | 6   |

### 3. Deskripsi Mata Kuliah

#### a. MATA KULIAH WAJIB

Nama Mata Kuliah: Pendidikan Agama

Kode : UNW00-001

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Memberikan pendidikan mengenai sikap, tindakan dan pengabdian ilmu dan pengetahuan yang diperolehnya kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah agama.

Nama Mata Kuliah : Kewarganegaraan

Kode : UNW00-003

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Memberikan pendidikan mengenai masalah dasar dalam ilmu bela negara khususnya negara Republik Indonesia. Materi pendidikan meliputi pengertian tentang wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik strategi hankamnas dan sistem Hankamrata sebagai pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran membela negara.

Nama Mata Kuliah : Pancasila

Kode : HKI 302

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Pancasila membahas Pancasila sebagai Pandangan Hidup, Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dengan tujuan agar mahasiswa mampu mewujudkan Nilai Dasar yang terkandung dalam Pancasila sehingga memiliki rasa religius dan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

Nama Mata Kuliah : Ilmu Negara

Kode : HIH 21-210

Jumlah SKS : 3

Deskripsi :

Ilmu negara merupakan mata kuliah MKKH yang mengkaji aliran pemikiran negara dan hukum yang berkenaan dengan makna dan fungsi ilmu negara, asal mula negara, tujuan negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, konsep-konsep kenegaraan, demokrasi, konstitusionalisme dan konstitusi atau UUD, negara hukum, pemisahan kekuasaan, HAM, keberadaan dan fungsi partai politik, dan teori tentang Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, serta penerapannya pada Hukum Tata Negara

Nama Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

Kode : UNW00-004

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Melatih menulis karya ilmiah dan mendiskusikannya dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Latihan meliputi menyusun kalimat yang mengandung gagasan utama dan pelengkap, kesatuan, koherensi, penekanan, variasi, kesejajaran dan penalaran dalam kalimat yang efektif, diksi yang mencakup: diksi, kata dan makna, struktur leksikal kata, teknik perluasan kata, pengaktifan, kosa kata, pemakaian kamus, ketepatan dan kesesuaian pilihan kata.

Nama Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum (PIH)

Kode : HIH 21-211

Jumlah SKS : 4

Deskripsi :

Sebagai mata kuliah dasar keahlian, Pengantar Ilmu Hukum diharapkan memberi landasan untuk mendukung mata kuliah lain sehingga memudahkan pemahaman mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi. Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum untuk mengantarkan mahasiswa yang mempelajari hukum ke arah yang sebenarnya.

Nama Mata Kuliah : Pengantar Hukum Indonesia (PHI)  
Kode : HIH 21-212  
Jumlah SKS : 4  
Deskripsi :  
Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman tentang hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia.

Nama Mata Kuliah : Hukum Konstitusi  
Kode : HIH 21-220  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata Kuliah ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan Konstitusi, perkembangan konstitusionalisme, perkembangan konstitusi RI, dan perkembangan ketatanegaraan RI yang berhubungan dengan perubahan konstitusi.

Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata  
Kode : HIH 21 -221  
Jumlah SKS : 4  
Deskripsi :  
Mata kuliah yang memberikan bekal kepada mahasiswa untuk dapat mengetahui dan mengerti tentang hukum perkawinan, hukum benda, dan hukum perikatan.

Mata Kuliah : Hukum Administrasi Negara  
Kode : HIH 21-223  
Jumlah SKS : 4  
Deskripsi :  
Mata Kuliah HAN merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program S1 Fakultas Hukum Undip. Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengertian, Teori dan Ruang Lingkup HAN, Dimensi Normatif HAN dan Landasan HAN, Pemerintahan Menurut Hukum, Tindak/Perbuatan Pemerintahan, Penyalahgunaan Wewenang dan Maladministrasi, Good Governance, Pengawasan Pemerintahan, dan Sanksi-sanksi HAN.

Nama Mata Kuliah : Hukum Tata Negara  
Kode : HIH 21-224  
Jumlah SKS : 4  
Deskripsi :  
Mata Kuliah HTN memberikan pemahaman tentang, Makna, Fungsi HTN dan Sumber HTN, Perkembangan HTN, asas-asas HTN Indonesia, proklamasi sebagai dasar pengembangan HTN, seperangkat aturan HTN, Bentuk Susunan Negara Indonesia.

Nama Mata Kuliah : Hukum Islam  
Kode : HIH 21-225  
Jumlah SKS : 4  
Deskripsi :  
Mata Kuliah Hukum Islam memberikan pemahaman bahwa hukum Islam yang berpedoman pada Alquran –Hadist mampu beradaptasi terhadap semua wilayah karena mempunyai prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku universal (syumul). Prinsip-prinsip dan kaidah tersebut bisa diterima dan direspsi menjadi peraturan yang berlaku serta bisa dipahami dari aspek kesejarahan hukum Islam dan aspek filosofi hukumnya. Lantaran hukum Islam mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, tidak hanya persoalan-persoalan ibadah semata, maka permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan juga menjadi obyek kajian dalam hukum Islam. Syarat dan rukun perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, istbat nikah, perceraian (talak) dan hak pemeliharaan anak. Kemudian berbicara tentang sejarah kewarisan Islam, hal-hal yang mencegah saling mewarisi, siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris, cara pembagian harta waris terhadap para ahli waris dan studi kasus hal-hal yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya peraturan yang diundangkan maka peraturan hukum perkawinan Islam dan kewarisan Islam lewat Kompilasi Hukum Islam bisa berlaku secara efektif.

Nama Mata Kuliah : Sosiologi dan Budaya Dasar  
Kode : HIH 21-226  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata kuliah Sosiologi Dan Budaya Dasar akan membahas dan mempelajari mengenai Ruang Lingkup Teori dan Metode Sosiologi, Proses-Proses Sosial, Kelompok Sosial, Kebudayaan Dan masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Stratifikasi Sosial, Kekuasaan Dan Wewenang, Perubahan Sosial, Perubahan Kebudayaan.

Nama Mata Kuliah : Kewirausahaan  
Kode : UNW00-007  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar tentang pengembangan skill untuk mengembangkan kemampuan sebagai pelaku usaha. Diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan aktivitas kewirausahaan mulai dari skala kecil dan pengembangannya.

Nama Mata Kuliah : Hukum Adat  
Kode : HIH 21-230  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata Kuliah Hukum Adat memberikan pemahaman bahwa hukum adat merupakan hukum yang masih berlaku hingga saat ini di tengah hukum nasional, karena itu harus memahami istilah dan pengertian hukum adat, juga mengenai kedudukan dan perkembangan hukum adat dalam politik hukum Indonesia, Hukum adat dilihat dari aspek kebudayaan Indonesia, hubungan hukum adat dengan kebudayaan yang tercermin dalam sistem hukum, corak masyarakat dan cara berpikirnya, serta manfaat mempelajari hukum adat. Disamping itu, mata kuliah hukum adat juga memberikan pemahaman bahwa terdapat tata susunan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat khususnya hak atas tanah (tanah ulayat), juga transaksi tanah menurut hukum adat dan transaksi yang berkaitan dengan tanah.

Nama Mata Kuliah : Hukum Bisnis  
Kode : HIH 21-231  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata Kuliah Hukum Dagang memberikan pemahaman bahwa dalam kegiatan bisnis tidak terlepas dari konflik kepentingan antara produsen dengan konsumen yang diatur oleh hukum supaya kegiatan bisnis dapat berjalan dengan teratur dengan memperhatikan dari aspek hukum administrasi, hukum privat dan hukum pidana. Disamping itu, mata kuliah hukum dagang juga memberikan pemahaman bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis seorang pengusaha tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu melakukan kerja sama dengan pihak lain serta tetap harus memiliki legalitas dalam melakukan kegiatan usaha. Berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan bisnis mulai dari pendirian perusahaan, berjalannya perusahaan berbagai bentuk kekayaan perusahaan sampai kemungkinan terjadinya kemungkinan terburuk dalam kegiatan usaha yaitu pailit merupakan pengetahuan yang harus dimiliki dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Nama Mata Kuliah : Hukum Pidana  
Kode : HIH 21-232  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang ilmu pidana, pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana, persoalan pokok dalam hukum pidana, tindak pidana, kesalahan dan alasan penghapusan pidana. Mahasiswa diharapkan dapat menghayati hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara tepat dan adil.

Nama Mata Kuliah : Hukum Ketenagakerjaan

Kode : HIH 21-233

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai hal-hal sebagai berikut : 1. Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan, yang meliputi peristilahan dan pengertian-pengertian, sejarah ketenagakerjaan, sifat dan hakekat ketenagakerjaan, kedudukan hukum ketenagakerjaan dan sumber hukum ketenagakerjaan; 2. Kebijakan Ketenagakerjaan yang meliputi, landasan dan asas ketenagakerjaan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan dan informasi ketenagakerjaan, dan pelatihan kerja; 3. Hubungan Kerja yang meliputi, perjanjian kerja, perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja; 4. Perlindungan Kerja yang meliputi, pekerja anak, pekerja perempuan, penyandang disabilitas, waktu kerja dan waktu istirahat; 5. Pengupahan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang meliputi, sistem pengupahan, BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Nama Mata Kuliah : Hukum Jaminan

Kode : HIH 21-234

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar (wajib) pada program studi S-1 Hukum. Mata Kuliah ini membahas tentang Hukum Jaminan, arti penting Hukum Jaminan dan Lembaga Jaminan, Preferensi, Privilege. Mata kuliah ini ditekankan pada pembahasan mengenai konsep dasar dan ruang lingkup Hukum Jaminan, Arti pentingnya Hukum Jaminan dan Lembaga Jaminan, Piutang yang Didahulukan, Perbandingan jaminan umum dan jaminan khusus, Tingkatan preferensi, Privilege Umum, Privilege Khusus. Arti pentingnya Hukum Jaminan dan Lembaga Jaminan, Piutang yang Didahulukan, Perbandingan jaminan umum dan jaminan khusus, Tingkatan preferensi, Privilege Umum, Privilege Khusus

Nama Mata Kuliah : Hukum dan Masyarakat

Kode : HIH 21-235

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Hukum Dan Masyarakat akan membahas dan mempelajari mengenai Ruang Lingkup Hukum Dan Masyarakat, Relevansi Hukum dan Masyarakat, Teori-Teori Hukum dan Masyarakat, Bekerjanya Hukum dan Masyarakat, Hukum Dan Perubahan Sosial, Hukum Tradisional dan Hukum Modern.

Nama Mata Kuliah : Hukum Otonomi Daerah dan Desa

Kode : HIH 21-236

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Hukum Otonomi Daerah dan Desa adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana pembentukan daerah dan pemerintahan daerah, serta bagaimana pembentukan desa dan pemerintahan desa. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa setelah mahasiswa mengambil mata kuliah Hukum Tata Negara.

Nama Mata Kuliah : Hukum Pajak

Kode : HIH 21-237

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah ini membahas tentang latar belakang pemungutan pajak dan teori-teori serta asas-asas perpajakan, pengertian pajak dan dasar hukumnya termasuk jenis pajak yang ada di Indonesia, utang pajak dan penagihannya, Hukum Pajak (pengertian, kedudukannya dalam tata hukum di Indonesia dan pembagiannya, hubungan hukum pajak dengan bidang hukum lainnya, tax reform dan Hukum Pajak Internasional), sengketa pajak dan penyelesaiannya termasuk lembaga peradilan pajak dan perkembangannya.

Nama Mata Kuliah : Hukum Agraria

Kode : HIH 21-238

Jumlah SKS : 3

Deskripsi :

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sejarah dan praktek pelaksanaan Hukum Pertanahan di Indonesia sejak zaman kolonial sampai keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria dengan segala aspek teori dan ketentuannya. Selain itu, mata kuliah hukum agraria juga memberikan gambaran kepada mahasiswa bahwa permasalahan pertanahan sangat kompleks menyangkut banyak dimensi dan banyak aspek baik berkaitan dengan perseorangan, badan hukum dan negara.

Nama Mata Kuliah : Hukum Lingkungan

Kode : HIH 21-240

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah Inti yang membahas: makna dan ruang lingkup HL (Indonesia), perkembangan HL dunia (internasional) dan HL Indonesia, asas-asas HL Indonesia, hak dan kewajiban orang atau badan hukum perdata serta peranserta masyarakat, pengaturan wewenang pengelolaan LH Indonesia, pengaturan pelestarian fungsi LH (penetapan baku mutu lingkungan, dampak besar dan penting, AMDAL, dan pengelolaan limbah serta pengelolaan B3), persyaratan penataan lingkungan hidup (perijinan, pengawasan, sanksi administratif, audit lingkungan hidup), penegakan HL (penyelesaian sengketa secara alternatif yaitu di dalam dan di luar peradilan, dan gugatan perwakilan, ganti rugi, tanggungjawab mutlak), peningkatan pendayagunaan berbagai peraturan perundang-undangan (dalam hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana) sehingga terangkum dalam suatu Sistem Hukum Lingkungan Hidup Indonesia.

Nama Mata Kuliah : Hukum Perusahaan

Kode : HIH 21-241

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Ilmu yang akan membahas mengenai hukum yang mengatur perusahaan (business organization) yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, baik di dalam KUHPperdata, KUHD maupun perundang - undangan lainnya.

Nama Mata Kuliah : Hukum Internasional

Kode : HIH 21-242

Jumlah SKS : 4

Deskripsi :

Mata kuliah Hukum Internasional ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami dan menganalisa ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang berkaitan dengan aktivitas subyek-subyek Hukum Internasional antara lain: Hakekat, Pengertian, dan Perkembangan Hukum Internasional; Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional; Dasar Kekuatan Mengikat Hukum Internasional; Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional; Subyek Hukum Internasional; Sumber Hukum Internasional; Kedaulatan Wilayah Negara; Yurisdiksi Negara; Pengakuan Internasional; Sukses Negara; Pertanggung-Jawaban Negara; Penyelesaian Sengketa Internasional.

Nama Mata Kuliah : Hukum Waris Perdata

Kode : HIH 21-243

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah ini membahas Pengetahuan tentang Hukum Waris yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dirasakan manfaatnya guna mempermudah dalam menyelesaikan kasus pewarisan yang menjadi pengetahuan yang sangat penting bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Mahasiswa dapat mengerti, memahami, menyebutkan, membandingkan, menjelaskan, melakukan pembagian, menganalisis kasus-kasus dan agar mahasiswa mampu memecahkan masalah jika dalam praktek dihadapkan pada kasus pewarisan. Penjelasan diarahkan untuk memberikan bekal teori kepada mahasiswa dalam rangka mengerti dan memahami ketentuan pewarisan menurut Hukum Perdata serta melakukan pembagiannya.

Nama Mata Kuliah : Hukum Hak Kekayaan Intelektual  
Kode : HIH 21-244  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Mata kuliah ini mengkaji tentang Hak Cipta dan Hak Milik Industri yang terdiri dari Hak Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tercecak Sirkuit Terpadu dan Faritas Tanaman, dikaji tentang sejarah Haki, Pengaturan Haki, secara nasional maupun internasional. Serta dikaji cara pendaftaran Haki substansi Haki dan penyelesaian sengketa, gugatan ganti rugi serta ketentuan pidana.

Nama Mata Kuliah : Perancangan Hukum  
Kode : HIH 21-245  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Perancangan Hukum merupakan mata kuliah tentang bagaimana Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, baik secara teori maupun secara teknis sesuai dengan pedoman sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Nama Mata Kuliah : Hukum Pelayanan Publik  
Kode : HIH 21-246  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Mata kuliah ini merupakan matakuliah lanjut bagi mahasiswa program S1 yang telah lulus mata kuliah HAN, dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai Pelayanan Publik dalam konteks hukum administrasi.

Nama Mata Kuliah : Hukum Pidana Khusus  
Kode : HIH 21-248  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Hukum Pidana Khusus merupakan mata kuliah yang secara langsung mengembangkan pengetahuan mahasiswa tentang bidang-bidang hukum pidana yang diatur di luar kodifikasi KUHP, yaitu: UUTPE, UUTPK, UUTPPU dan pelaksanaannya dalam praktek penegakan hukum.

Nama Mata Kuliah : Hukum Perjanjian  
Kode : HIH 21-249  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Mata kuliah hukum perjanjian akan membekali mahasiswa dalam memahami tentang perjanjian mulai dari pengertian, unsur, azas serat syarat-syarat sahnya perjanjian dan berakhirnya perjanjian baik yang dibuat secara lisan maupun yang dibuat secara tertulis.

Nama Mata Kuliah : Kriminologi  
Kode : HIH 21-250  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Kriminologi secara umum bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga pada akhir kuliah, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan baik. Dengan berkembangnya setelah tahun '60 an, khususnya dengan pemikiran kritis yang mengarahkan studinya dalam mempelajari proses- proses pembuatan UU maupun bekerjanya hukum, maka mahasiswa diharapkan memahami kondisi realitas dalam masyarakat secara kritis.

Nama Mata Kuliah : Hukum Acara Perdata  
Kode : HIH 21-251  
Jumlah SKS : 3  
Deskripsi :



Mata kuliah hukum acara perdata memberikan pemahaman mengenai kompetensi Peradilan Umum. Setelah mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara perdata, mahasiswa harus memahami ketentuan asas yang berlaku sebagai landasan operasional. Mata kuliah hukum acara perdata berusaha memberi pemahaman mengenai proses beracara di pengadilan yang bertujuan menyelesaikan perkara perdata, yang dimulai dari munculnya perkara perdata, hingga pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam mata kuliah ini juga akan dikenalkan upaya penyelesaian perkara selain upaya litigasi dengan tujuan penyelesaian perkara perdata.

Nama Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana

Kode : HIH 21-252

Jumlah SKS : 3

Deskripsi :

Mata kuliah Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai tugas dan keberadaan dari hukum acara pidana untuk menjadi petunjuk dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana yang di atur dalam undang-undang pidana sehingga mata kuliah ini pada dasarnya membahas mengenai dua proses dalam hukum acara pidana, yaitu proses pemeriksaan pendahuluan dan proses pemeriksaan di sidang.

Nama Mata Kuliah : Hukum Acara Tata Usaha Negara

Kode : HIH 21-253

Jumlah SKS : 3

Deskripsi :

Mata kuliah hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pemahaman mengenai kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, mahasiswa harus memahami bahwa setiap pengadilan memiliki asas khusus sebagai landasan operasional selain asas umum peradilan. Mata kuliah hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berusaha memberi pemahaman mengenai para pihak yang dapat berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, syarat formil dan syarat materiil pengajuan gugatan, pemeriksaan sengketa sebelum diperiksa oleh Majelis Hakim, hingga pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Nama Mata Kuliah : Etika dan Tanggung Jawab Profesi

Kode : HIH 21-254

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang etika profesi hukum serta pertanggungjawabannya, yang meliputi pengertian etika pada umumnya, cara berpikir etis, jenjang kesadaran etika, code etik advokat, serta kode etik notaris.

Nama Mata Kuliah : Hukum Laut Internasional

Kode : HIH 21-255

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah ini membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara di wilayah laut sebagai wilayah yang diatur oleh hukum internasional yang bersifat publik berdasarkan UNCLOS 1982. Cakupannya meliputi berbagai rezim hukum di wilayah laut, mulai dari wilayah pesisir, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, kawasan, negara kepulauan dan perairan kepulauan, penelitian ilmiah kelautan serta sengketa di bidang hukum laut melalui ITLOS dan ICJ.

Nama Mata Kuliah : Hukum Perjanjian Internasional

Kode : HIH 21-256

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah pembuatan dan pelaksanaan perjanjian internasional meliputi pengertian dan definisi PI, Istilah PI, Sumber Hukum PI, Klasifikasi PI, Proses Pembuatan PI dan Unsur-unsur Formal Naskah PI, Pengikatan Terhadap PI, Ratifikasi PI, Reservasi PI, Amandemen PI, Penafsiran PI, Pelaksanaan PI, Mulai dan Berakhirnya PI, PI oleh Pemda, Karakter Norma PI Hard Law dan Soft Law dan praktek-praktek pembuatan dan pelaksanaan perjanjian internasional.

Nama Mata Kuliah : Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kode : HIH 21-257

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah ini membahas berbagai aspek terkait HAM, dari pengertian, konsep, prinsip, teori, instrumen hukum internasional dan nasional tentang HAM, maupun mekanisme pemantauan HAM di level internasional serta mekanisme perlindungan dan penegakan HAM di tingkat nasional.

Nama Mata Kuliah : Filsafat Hukum

Kode : HIH 21-258

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Filsafat Hukum memberikan pemahaman bahwa, pertama-tama, Filsafat Hukum pada dasarnya merupakan bagian dari Filsafat yang membahas, utamanya, Hukum. Kedua, dalam maknanya yang sempit, Filsafat Hukum mempelajari hakikat hukum, yang diejawantahkan ke dalam beragam aliran Filsafat Hukum; sedangkan sejatinya dalam maknanya yang luas, Filsafat Hukum meliputi tidak hanya Filsafat Hukum itu sendiri yang mempelajari hakikat hukum, melainkan juga Teori Hukum yang menelusuri hubungan antara manusia dengan hukum, Ilmu Hukum yang membahas bagaimana penyelesaian permasalahan hukum, serta Praktik Hukum yang mengulas pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum tersebut. Ketiga, telaah inter-relatif dan komprehensif, tentang hakikat hukum, hubungan antara manusia dengan hukum, bagaimana penyelesaian permasalahan hukum, serta pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum, inilah yang kemudian disebut sebagai Telaah Paradigmatik. Keempat, fokus Mata Kuliah Filsafat Hukum untuk Program Studi S-1 Ilmu Hukum adalah pada hakikat hukum, yang didukung oleh, pertamama, hubungan manusia dan hukum, kemudian oleh bagaimana penyelesaian permasalahan hukum, serta oleh pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum. Dalam konteks ini, Mata Kuliah Filsafat Hukum membahas tentang makna Filsafat; cakupan Filsafat; cara berpikir Filsafat; definisi Filsafat Hukum; pokok-pokok Filsafat Hukum; Filsafat Hukum dan dinamika pemikiran hukum; Paradigma / Kajian Paradigmatik sebagai landasan berpikir baru dalam Filsafat Hukum; makna Paradigma; Paradigma, Filsafat Hukum, Teori Hukum, Ilmu Hukum, dan Praktik Hukum; sumbangan Praktik Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Filsafat Hukum, dan Kajian Paradigmatik bagi pemahaman hukum; ragam definisi Paradigma; Paradigma Utama di lingkungan Akademik; Paradigma dan aliran Filsafat Hukum, gradasi perbedaan paradigmatik aliran Filsafat Hukum.

Nama Mata Kuliah : Argumentasi Hukum

Kode : HIH 21-259

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah argumentasi hukum merupakan mata kuliah yang memberikan ketrampilan ilmiah untuk memecahkan masalah – masalah hukum.

Nama Mata Kuliah : Hukum Pidana Internasional

Kode : HIH 21-260

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Hukum Pidana Internasional merupakan bidang baru dalam khasanah ilmu hukum di Indonesia, yang bersumber pada dua disiplin ilmu, yaitu ilmu Hukum Pidana Nasional negara dan ilmu Hukum Internasional. Keterbatasan dalam penerapan Hukum Pidana Nasional suatu negara atas kejahatan internasional dewasa ini, menjadikan Hukum

Pidana Internasional sebagai sarana utama dalam penegakan hukum untuk menghukum dan mengadili pelaku kejahatan yang berada di luar yurisdiksi kriminal suatu negara.

Nama Mata Kuliah : Upaya Hukum Perkara Tata Usaha Negara

Kode : HIH 21-261

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Upaya Hukum Perkara Tata Usaha Negara memberi pemahaman mengenai pelbagai upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mahasiswa harus memahami proses mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan pengecualian terhadap perkara yang tidak bisa diajukan kasasi. Mata kuliah upaya hukum perkara Tata Usaha Negara memberi pemahaman bahwa dengan disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi PTUN menjadi lebih luas serta ketentuan baru mengenai sanksi administratif bagi Pejabat Tata Usaha Negara dan upaya hukumnya.

Nama Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana Khusus

Kode : HIH 21-262

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Hukum Acara Pidana Khusus merupakan mata kuliah kelanjutan dari mata kuliah Hukum Acara Pidana. Guna melengkapi materi mata kuliah tersebut, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memungkinkan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana khusus. Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memungkinkan terbentuknya pengadilan-pengadilan yang bersifat khusus di dalam lingkup peradilan umum. Pengadilan-pengadilan khusus tersebut, antara lain Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pengadilan-pengadilan khusus tersebut berlaku ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang bersifat khusus yang berfungsi sebagai "lex specialist" terhadap KUHAP.

Nama Mata Kuliah : Upaya Hukum Perkara Perdata

Kode : HIH 21-263

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Upaya Hukum Perkara Perdata memberi pemahaman mengenai pelbagai upaya hukum yang dimungkinkan untuk melawan putusan perkara perdata. Mahasiswa harus memahami proses upaya hukum melawan putusan pengadilan baik dalam proses verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun derdenverzet. Mata kuliah upaya hukum perkara perdata juga memberi pemahaman dimungkinkannya berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap proses litigasi antara lain upaya hukum atas sita dan eksekusi.

Nama Mata Kuliah : Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

Kode : HIH 21-264

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum ini akan membahas tentang Jenis-Jenis Penelitian Hukum, Paradigma Penelitian, Konsep-Konsep Hukum, Asas-Asas Penelitian Hukum, Penelitian Doktrinal, Penelitian Non Doktrinal, serta mengajarkan Teknik Pembuatan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi.

Nama Mata Kuliah : Kuliah Kerja Nyata

Kode : UNW00-008

Jumlah SKS : 3

Deskripsi :

KKN merupakan mata kuliah yang memberikan pengalaman belajar, bekerja sebagai kader pembangunan dengan cara hidup di tengah-tengah masyarakat, selain itu mendeskripsikan PTN dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat dengan cara

menjaga kesinambungan kerjasama, juga membekali mahasiswa agar mendapat ketrampilan hidup (life skill) setelah lulus kuliah.

Nama Mata Kuliah : Kemahiran Litigasi

Kode : HIH 21-270

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Kemahiran Litigasi merupakan mata kuliah yang melatih mahasiswa, mahir, dan ahli dalam menangani persoalan-persoalan hukum melalui lembaga peradilan. Materi yang diberikan terdiri dari materi bidang hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara TUN, hukum acara peradilan agama dan hukum acara khusus dalam Pengadilan HAM. Kemahiran Litigasi pada masing-masing bidang tersebut melatih mahasiswa agar terampil/mahir dan ahli dalam menangani persoalan-persoalan perkara, yang terjadi dari mempersiapkan atau membuat berkas-berkas sampai dengan beracara di pengadilan.

#### **b. MATA KULIAH WAJIB BAGIAN DAN PILIHAN BAGIAN WAJIB BAGIAN HUKUM PERDATA**

Nama Mata Kuliah : Lab Perancangan Kontrak

Kode : HIH 21-300

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Lab Hukum Kontrak adalah matakuliah yang menggabungkan pemahaman teoritis dan kemampuan praktek merancang dan menganalisis kontrak, yang selanjutnya membentuknya menjadi pendapat hukum (legal opinion).

#### **WAJIB BAGIAN HUKUM PERDATA KONSENTRASI HUKUM PERDATA BARAT**

Nama Mata Kuliah : Kapita Selektta Hukum Perdata Barat

Kode : HIH 21-301

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Kapita Selektta hukum perdata merupakan matakuliah wajib bagian yang mengkaji perkembangan perjanjian-perjanjian modern, terutama yang berhubungan dengan asas-asas hukum perjanjian, unsur-unsur perjanjian terutama dalam hal adanya klausula baku yang mengandung unsur eksonerasi, garansi dan adhesi.

Nama Mata Kuliah : Perbuatan Melawan Hukum

Kode : HIH 21-302

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Perbuatan Melawan Hukum merupakan mata kuliah yang membahas tentang pengaturan, unsur perbuatan melawan hukum serta teori-teori yang berkembang di dalam membahas perbuatan melawan hukum seperti teori kesalahan, anggapan bersalah, resiko dan pertanggungjawaban mutlak serta relativitas dalam pembatasan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum.

Nama Mata Kuliah : Hukum Harta Kekayaan

Kode : HIH 21-303

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Hukum harta kekayaan membahas / memberikan pemahaman tentang pengertian harta kekayaan secara luas dan sempit, sumber terciptanya harta kekayaan, macam-macam harta, kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan, pengalihan dan pembebanan harta kekayaan, pengurusan dan penyelesaian sengketa terhadap harta kekayaan. Hukum harta kekayaan sebagai mata kuliah ini menyiapkan mahasiswa untuk mempelajari dan membahas mata kuliah hukum harta kekayaan dalam teori dan praktiknya di Indonesia.

## **PILIHAN BAGIAN HUKUM PERDATA KONSENTRASI HUKUM PERDATA BARAT**

Nama Mata Kuliah : Hukum Apartemen

Kode : HIH 21-316

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Hukum Apartemen memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Latar belakang dan konsep pembangunan rumah susun.
2. Pembangunan rumah susun.
3. Prosedur penerbitan sertifikat dan penjualan rumah susun dan satuan rumah susun.
4. Hak dan kewajiban pemilik satuan rumah susun.
5. Hak jaminan terhadap rumah susun dan satuan rumah susun.
6. Pengelolaan rumah susun dan pemilikan rumah susun oleh orang asing.

Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata Internasional

Kode : HIH 21-317

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional (HPI) membahas mengenai masalah hukum yang mengatur hubungan perdata dengan memakai hukum asing/hukum nasional yang ditulis untuk hubungan-hubungan hukum yang bersifat internasional, Hukum Perdata Internasional Substantif, Hukum Perdata Internasional Ajektif dan Petunjuk Dalam Menyelesaikan Dibidang Perkara Perdata Internasional.

Nama Mata Kuliah : Hukum Perjanjian Bernama

Kode : HIH 21-318

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah hukum Perjanjian Bernama memberikan pemahaman bahwa didalam kehidupan dimasyarakat banyak sekali jenis perjanjian yang dibuat. Namun tidak semua perjanjian dengan segala aspek hukumnya sudah diatur dalam KUHPerduta, ada jenis perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seiring dengan adanya asas yang berlaku dalam hokum perjanjian di Indonesia yaitu asas Kebebasan Berkontrak.

Cara garis besar mata kuliah ini menjelaskan mengenai perjanjian bernama sebagai subsistem dalam sistim hokum perjanjian di

Indonesia, macam-macam Perjanjian Bernama, hubungan hokum yang terjadi antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Nama Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Perdata

Kode : HIH 21-319

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata akan membekali mahasiswa melakukan perbandingan hukum perdata ( mencari persamaan, perbedaan dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya), keahlian tersebut bisa dijadikan bekal mahasiswa dalam menulis tugas akhir (skripsi) maupun bekal kelak setelah lulus yaitu saat mahasiswa bekerja di bidang hukum, sebab hampir seluruh kegiatan di bidang hukum perdata ( pembuat, penegak, maupun praktisi hukum sangat memerlukan ilmu perbandingan hukum).

Nama Mata Kuliah : Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional

Kode : HIH 21-320

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah ini membahas konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional dan konvensi-konvensi unifikasi hukum yang menitik beratkan pada latar belakang dan tujuan pembentukan, ringkasan anatomi, status, organisasi dan manajemen substansi, sejauh mana keikutsertaan Indonesia, telaah kasus yang berkaitan dengan konvensi khususnya tentang, proses acara, hukum keluarga, jaminan, investasi, hak kekayaan intelektual, jual beli internasional, serta penyelesaian sengketa, guna mempermudah

hubungan berperkara dengan negara-negara lain agar dapat ikut berpartisipasi sebagai anggota dari family of nations.

Nama Mata Kuliah : Hukum Perjanjian Pemborongan

Kode : HIH 21-321

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Hukum Perjanjian Pemborongan (Pengadaan Barang dan Jasa) adalah matakuliah yang mengajarkan teori-teori perjanjian secara umum, yang ditindak lanjuti dengan memahami dan mencermati perjanjian pemborongan /pengadaan barang dan jasa baik o leh pihak pemerintah maupun swasta. Pada akhir kuliah mahasiswa diharapkan sudah mampu untuk menilai “baik/tidak baik” sebuah perjanjian pemborongan yang lazim digunakan dalam praktek perjanjian pemborongan (Pengadaan barang dan jasa).

Nama Mata Kuliah : Hukum Catatan Sipil

Kode : HIH 21-322

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Hukum catatan sipil membahas / memberikan pemahaman tentang pengertian dan aspek keperdataan catatan sipil dan hal -hal yang berkaitan dengan hubungan lembaga catatan sipil dengan lembaga lainnya. Hukum catatan sipil sebagai mata kuliah ini menyiapkan mahasiswa untuk mempelajari dan membahas mata kuliah hukum catatan sipil dalam teori dan praktiknya di Indonesia.

#### **WAJIB BAGIAN HUKUM PERDATA KONSENTRASI HUKUM BISNIS**

Nama Mata Kuliah : Kapita Selektta Hukum Bisnis

Kode : HIH 21-304

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah kapita selekta hukum dagang akan membekali mahasiswa mengenai materi-materi hukum persaingan usaha.

Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan

Kode : HIH 21-305

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah hukum surat berharga akan membekali mahasiswa secara legal mengenai perbedaan penyelesaian utang melalui kepailitan dan PKPU , yang meliputi persyaratan , para pihak baik yang mengajukan maupun yang dimohonkan , akibat dan berakhirnya Kepailitan dan PKPU.

Nama Mata Kuliah : Hukum Lembaga Keuangan

Kode : HIH 21-306

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Hukum Lembaga Keuangan memberikan pemahaman bahwa Lembaga Keuangan sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang mendapat pengawasan secara makroprudensial dan mikroprudensial serta memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi .

Di samping itu mata kuliah ini juga memberikan pemahaman bahwa regulasi Lembaga Keuangan pada berbagai periode memberikan dampak struktural terhadap kelembagaan dan mekanisme pengawasan Lembaga Keuangan.

Pemahaman Lembaga Keuangan sebagai badan usaha yang memberikan berbagai jasa keuangan serta tindak pidana Lembaga Keuangan.

Mata kuliah ini juga menjelaskan isu isu terbaru tentang hukum Lembaga Keuangan yang selalu dinamis mengikuti perkembangan skala nasional dan internasional.

#### **PILIHAN BAGIAN HUKUM PERDATA KONSENTRASI HUKUM BISNIS**

Nama Mata Kuliah : Hukum Transportasi

Kode : HIH 21-323

Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Hukum Transportasi ditawarkan sebagai mata kuliah pilihan yang bertujuan untuk membekali mahasiswa/ memberikan kompetensi, dan kemampuan tentang arti pentingnya pengangkutan, sifat hukum perjanjian pengangkutan, jenis-jenis pengangkutan, pihak-pihak dalam transportasi darat, laut dan udara serta dokumen pengangkutan barang melalui darat, laut udara, periode tanggung jawab, dasar tanggung jawab, batas tanggung jawab, pengajuan gugatan/klaim.

Nama Mata Kuliah : Hukum Lembaga Pembiayaan  
Kode : HIH 21-325  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata kuliah hukum surat berharga akan membekali mahasiswa secara legal cara-cara pemenuhan modal bagi bisnis, dasar-dasar hukum lembaga pembiayaan, jenis-jenis lembaga pembiayaan seperti Modal Ventura, Leasing, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit dan Pembiayaan Infrastruktur.

Nama Mata Kuliah : Hukum Perlindungan Konsumen  
Kode : HIH 21-326  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Hukum Perlindungan Konsumen (HPK) ditawarkan sebagai mata kuliah pilihan yang bertujuan memberikan kompetensi, penguasaan HPK serta memberi landasan tentang teori-teori perlindungan konsumen, serta memahami masalah-masalah yang timbul dari hubungan pelaku usaha dengan pelaku usaha, sengketa konsumen serta penyelesaiannya.

Nama Mata Kuliah : Hukum Pasar Modal  
Kode : HIH 21-327  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata Kuliah Hukum Pasar Modal memberikan pemahaman bahwa pasar modal sebagai alternative pengembangan perusahaan dilihat dari berbagai aspek bidang hukum. Secara garis besar mata kuliah ini menjelaskan mengenai Pasar Modal sebagai sub sistem dalam Sistem Keuangan Nasional,. Dasar Pengetahuan Pasar Modal dan Pengetahuan Hukum Pasar Modal. Pengetahuan Dasar Pasar Modal terdiri dari : Karakter dan Manfaat Pasar Modal, Komoditi Pasar Modal serta Lembaga dan Profesi Penunjang  
Pasar Modal Instrumen Pasar Modal , Mekanisme Transaksi di Pasar Modal serta hubungan Pasar modal dan Perbankan. Pengetahuan hukum pasar modal meliputi Pengaturan Pasar Modal, Azas Hukum Pasar Modal, Berbagai syarat dan prosedur Initial Public Offering (IPO) serta pengaturan Corporate Action dalam kegiatan pasar modal serta Tindak Pidana Pasar Modal. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman tentang aspek internasional dalam kegiatan pasar modal serta perkembangan terbaru isu isu pasar modal.

Nama Mata Kuliah : Hukum Surat Berharga  
Kode : HIH 21-328  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata kuliah hukum surat berharga akan membekali mahasiswa secara legal mengenai penerbitan surat berharga, hak dan kewajiban para pihak dalam penerbitan surat berharga. Aspek-aspek hukum secara spesifik untuk jenis-jenis surat berharga seperti wesel, bills of exchange, cek, cek perjalanan, bilyet giro, surat sanggup, commercial paper, SBI, SUN.

Nama Mata Kuliah : Hukum Asuransi  
Kode : HIH 21-329  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Hukum asuransi membahas / memberikan pemahaman tentang pengertian pokok dan asas-asas dalam perjanjian asuransi dan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Hukum asuransi sebagai mata kuliah ini menyiapkan mahasiswa untuk mempelajari dan membahas mata kuliah asuransi dan hukum asuransi dalam teori dan prakteknya di dunia perasuransian di Indonesia.

#### **WAJIB BAGIAN HUKUM PERDATA KONSENTRASI HUKUM AGRARIA**

Nama Mata Kuliah : Kapsel Hukum Agraria

Kode : HIH 21-307

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Kapita Selektta Hukum Agraria memberikan pemahaman lebih mendalam bahwa permasalahan bidang agraria dalam praktek di masyarakat sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek bidang yang lain. Permasalahan agraria dalam praktek semakin rumit karena sering tidak sinkron antara kenyataan dan peraturan atau teori yang ada yang pernah dipelajari dalam mata kuliah Hukum Agraria. Untuk itulah maka diperlukan pemilihan materi aktual dan banyak terjadi dalam masyarakat yang perlu di jelaskan, dianalisis dan dikritisi seperti: Land Reform (Reforma Agraria) di Indonesia kaitanya dengan Program PAPAN; Praktek Peralihan Hak & Pendaftarannya; Tanah untuk Perusahaan dan Ijin Lokasi; Masalah-masalah Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum; Sekitar Konsolidasi Tanah (Land Consolidation,LC) dan Manfaatnya; Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang; Hukum Agraria & Otonomi Daerah; Reklamasi Pantai/Laut dan Permasalahannya.

Nama Mata Kuliah : Teori dan Praktek Hak Tanggungan

Kode : HIH 21-308

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Teori dan Praktek Hak Tanggungan memberikan pengetahuan tentang lembaga jaminan atas tanah, khususnya Hak Tanggungan (HT) di Indonesia, meliputi pengertian hak jaminan atas tanah sebagai jaminan hutang, pengertian HT, HT pelengkap perjanjian pokok, ciri dan obyek HT, perjanjian dalam HT, pemberian dan pendaftaran HT, Kuasa pada HT, pencatatan dan penghapusan HT, pembersihan HT dan tugas hakim dalam HT serta Eksekusi HT.

Nama Mata Kuliah : Hukum Pendaftaran Tanah

Kode : HIH 21-309

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah ini berisi teori-teori dan penerapan dalam praktek. Sebagai teori mengkaji tentang prinsip-prinsip umum hukum pendaftaran tanah meliputi pengertian dan dasar hukum pendaftaran tanah, asas-asas pendaftaran tanah, tujuan dan fungsi pendaftaran tanah, objek pendaftaran tanah, sistem pendaftaran tanah dan sistem publikasi pendaftaran tanah, kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah sebagai hasil proses pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Kajian prakteknya yaitu berisi tentang pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertamakali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, Instansi Penyelenggara pendaftaran tanah serta menganalisis kasus-kasus pendaftaran tanah dalam praktek. Hukum Pendaftaran Tanah merupakan mata kuliah lanjutan dan merupakan mata kuliah wajib bagian bagi mahasiswa yang akan mengambil konsentrasi Hukum Agraria.

#### **WAJIB BAGIAN HUKUM PERDATA KONSENTRASI HUKUM ADAT**

Nama Mata Kuliah : Kapita Selektta Hukum Adat

Kode : HIH 21-310

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Kapita Selektta Hukum Adat memberi pengetahuan secara kritis dan analistis melalui pengkajian terhadap perkembangan Hukum Adat, yang selalu tumbuh berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang meliputi: a. Pengantar Kapita



Selekta Hukum Adat, b. Eksistensi Hukum Adat dalam pembangunan hukum nasional. c. Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat hk adat dalam Regulasi. d. Pengakuan Hak Ulayat masyarakat hk adat dalam Implementasinya, e. penyelesaian sengketa tanah adat yang ideal, f. Pengangkatan anak menurut Hukum Adat Setelah diundangkannya PP 54/2007. g. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat di masyarakat yang mayoritas beragama Islam, h. Eksistensi Perkawinan menurut Hukum Adat Setelah diundangkannya UU 1/1974, i. Hukum Waris Adat dan Perkembangannya, j. Perkembangan hak mewaris perempuan di masyarakat patrilineal, k. Bagi hasil menurut Hukum Adat setelah diundangkannya UU No 2/1960.

Nama Mata Kuliah : Antropologi Hukum  
 Kode : HIH 21-311  
 Jumlah SKS : 2  
 Deskripsi :

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang hubungan budaya dengan hukum, definisi Antropologi Hukum (Anhum) dengan kaitannya dengan manfaat mempelajari Anhum, ruang lingkup dan pendekatan Anhum, definisi hukum dalam persepektif Anhum, perkembangan teori-teori Anhum pada era evolusionisme, fungsionalisme dan pluralisme hukum, konsep multikulturalisme sebagai pendamping pluralisme hukum, penjabaran teori-teori Anhum, seperti justice in many rooms, shopping forum-forum shopping, semi autonomous social field, dan street level bureaucracy.

#### **WAJIB BAGIAN HUKUM PERDATA KONSENTRASI HUKUM ISLAM**

Nama Mata Kuliah : Kapita Selektta Hukum Islam  
 Kode : HIH 21-313  
 Jumlah SKS : 2  
 Deskripsi :

Mata Kuliah Kapita Selektta Hukum Islam dimaksudkan untuk membekali kepada mahasiswa pemahaman-pemahaman tentang hukum Islam yang penting dan muncul saat ini. Bagaimana menyikapinya serta menjelaskan bagaimana cara memutuskan masalah baru tersebut dalam hukum Islam.

Nama Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Syariah  
 Kode : HIH 21-314  
 Jumlah SKS : 2  
 Deskripsi :

Mata kuliah ini membahas tujuan ekonomi Islam, kedudukan ekonomi Islam dalam hukum Islam dan agama Islam; mengenal landasan hukum ekonomi Islam di Indonesia, mengetahui prinsip-prinsip larangan ekonomi Islam; mengenal perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan berbagai negara; institusi yang terkait dengan operasional lembaga ekonomi/keuangan Islam di Indonesia; menunjukkan ragam karakter lembaga ekonomi/keuangan Islam, regulasi lembaga keuangan Islam; mengenal lembaga penegakan hukum dan penyelesaian sengketa ekonomi Islam.

Nama Mata Kuliah : Hukum Zakat dan Wakaf  
 Kode : HIH 21-315  
 Jumlah SKS : 2  
 Deskripsi :

Mata kuliah Hukum Wakaf dan zakat memberikan pemahaman bahwa hukum zakat dan wakaf memiliki cakupan pembahasan yang cukup luas, meliputi ketentuan wakaf dan zakat menurut fikih dan peraturan perundang-undangan mengenai legalitas obyek wakaf dan zakat, pengelolaan wakaf dan zakat, dan pentasharrufan pada mustahiq dan mauquf 'alaih. Pembahasan juga dikaitkan dengan aspek sejarah, praktek wakaf dan zakat di masyarakat Islam Indonesia, sengketa zakat dan perwakafan, maupun sanksi pidana zakat dan perwakafan.

#### **PILIHAN BAGIAN HUKUM PERDATA KONSENTRASI HUKUM AGRARIA, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**

Nama Mata Kuliah : Hukum Tata Cara Perolehan Tanah  
 Kode : HIH 21-330  
 Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Hukum Tata Cara Perolehan Tanah berisi tentang teori dan konsep serta asas perolehan tanah. Sebagai teori mengkaji tentang prinsip-prinsip umum Hukum Perolehan Tanah meliputi pengertian, dasar hukum, asas-asas, sistem perolehan tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengadaan tanah untuk kepentingan swasta dan pencabutan hak atas tanah. Mata kuliah ini juga menganalisis kasus-kasus pengadaan tanah untuk pembangunan yang terjadi dalam praktek. Hukum Tata Cara Perolehan Tanah ini adalah mata kuliah pilihan bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi Hukum Agraria/Tanah.

Nama Mata Kuliah : Hukum Perbankan Syariah

Kode : HIH 21-331

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Hukum Perbankan Syariah memberikan pemahaman mengenai HUKUM yang berkaitan dengan Perbankan Syariah, yaitu tinjauan hukum mengenai perbankan syariah di Indonesia.

bahwa dalam kegiatan Intermediasi keuangan masyarakat perlu dipahami, perbankan tidak diharamkan di dalam hukum Islam, tetapi perbankan tidak boleh mengandung unsur riba, ghoror dan maisir. Hal itulah yang menjebabkan diperlukannya Perbankan Syariah di Indonesia. Perbankan Syariah, adalah lembaga perbankan yang didasarkan kepada prinsip syariah, yaitu prinsip usaha pengelolaan keuangan yang diatur dalam Hukum Islam. Dalam perkembangan sistem perbankan nasional, telah diterbitkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur mengenai eksistensi perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia, baik kelembagaannya, tata kelola maupun penyelesaian sengketa, sedangkan mengenai skema transaksi dan akad perbankan diatur di dalam Hukum Islam.

Nama Mata Kuliah : Delik Adat

Kode : HIH 21-334

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Delik Adat, yang meliputi Pengantar Delik Adat, definisi Delik Adat, Sistem Delik Adat, Jenis-jenis Delik Adat tentang keamanan, Jenis-jenis Delik Adat tentang ketertiban, Jenis-jenis Delik Adat tentang tata tertib pemerintahan, Delik Adat tentang kesopanan, Jenis-jenis Delik Adat tentang kesusilaan, Jenis-jenis Delik Adat tentang dalam perjanjian, Delik Adat tentang tanah, Delik Adat tentang tanam tumbuhan, Delik Adat tentang Hasil Hutan, Delik Adat menyangkut Hewan, Ternak, dan Perikanan, Peradilan Adat.

#### **WAJIB BAGIAN HUKUM PIDANA**

Nama Mata Kuliah : Kapita Selekt Hukum Pidana

Kode : HIH 21-336

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Pada akhir kuliah mahasiswa diharapkan mengetahui masalah- masalah dasar hukum pidana kita. Mengetahui dan memahami masalah penghukuman dan gagasan pemasyarakatan, memahami masalah pembaharuan hukum di Indonesia.

Nama Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Pidana

Kode : HIH 21-337

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Perbandingan Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang secara langsung mengembangkan pengetahuan mahasiswa tentang metode membandingkan hukum pidana nasional dengan hukum pidana asing.

Nama Mata Kuliah : Politik Hukum Pidana

Kode : HIH 21-338

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Politik Hukum Pidana (Criminal Law Policy) adalah ilmu sekaligus seni di mana aturan perundang-undangan pidana dirumuskan secara efektif dan efisien. Ilmu ini adalah ilmu tentang perundang-undangan pidana di mana merupakan ilmu yang interdisipliner yaitu meliputi : ilmu hukum pidana, filsafat hukum pidana, kriminologi, viktimologi , dan perbandingan hukum pidana, sehingga dengan ilmu Politik Hukum Pidana dapat dirumuskan perundang-undangan pidana yang berkeseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Nama Mata Kuliah : Kapita Selekt Kriminologi

Kode : HIH 21-339

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Memberikan pemahaman tentang perkembangan kriminologi terkini sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan perkembangan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat. Pemahaman tersebut berkaitan dengan pemahaman bahwa perkembangan kejahatan saat tidak terbatas ruang dan waktu serta tidak terbatas bahwa pelaku kejahatan hanya individu, namun kejahatan bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat dan negara dalam bentuk kebijakan serta kejahatan dalam arti yang lebih luas juga terjadi melalui media masa, media elektronik. Pemahaman kejahatan dalam penanganan saat ini dalam instrumen Nasional melalui Diversi maupun Keadilan Restoratif, serta Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

#### **PILIHAN BAGIAN HUKUM PIDANA**

Nama Mata Kuliah : Viktimologi

Kode : HIH 21-340

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Viktimologi merupakan mata kuliah pendalaman yang membahas berbagai aspek tentang korban kejahatan. Meskipun hakekatnya merupakan disiplin yang berdiri sendiri, viktimologi diberikan secara terintegratif dengan kriminologi. Materi pokok yang diberikan dalam viktimologi mencakup pengertian Viktimologi ; Pendekatan dalam mempelajari viktimologi; Ruang lingkup viktimologi; Hubungan korban dan pelaku kejahatan; Hubungan korban dengan masyarakat; Eksistensi korban dalam sistem peradilan pidana; Lembaga dan kepranataan.

Nama Mata Kuliah : Penologi

Kode : HIH 21-341

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Memberikan pemahaman tentang Penologi sebagai politik kriminal (crimele politik, control of crime) tidak hanya mempelajari ketentuan yang ada dalam perundang-undangan saja dan suatu tempat / negara tertentu, melainkan juga mempelajari masalah penal tanpa batas wilayah dan tanpa batas waktu. Penologi tidak hanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pidana, tetapi juga yang di luar pidana. Di dalam mempelajari Penologi bukanlah sekedar untuk memahami tujuan pembedaan maupun pengaruh pembedaan bagi pelaku kejahatan, serta masyarakat namun juga mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan masalah penjara maupun masyarakat, serta tentang perkembangan teori pembedaan. Memberikan pemahaman tentang perkembangan penjara saat ini serta perkembangan penjara di Indonesia serta Sistem masyarakat.

Nama Mata Kuliah : Hukum Pidana Anak

Kode : HIH 21-342

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Anak merupakan generasi muda yang perlu dijaga kualitasnya. Dalam perkembangannya menuju ke kedewasaan, tidak jarang anak mengalami hambatan dalam perilakunya (cenderung menyimpang). Karena keterbatasan fisik dan psikisnya, anak yang bermasalah perlu mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang khusus. Hukum Pidana Anak merupakan salah satu mata kuliah yang ingin menunjukkan kepada mahasiswa, bagaimana masalah anak harus dipahami agar treatment dan bentuk

perlindungan lain yang diberikan kepada anak dapat dilakukan secara tepat sehingga tujuan untuk mensejahterahkan dan melindungi anak dapat dilakukan dengan tepat pula tanpa mengabaikan sendi-sendi hukum yang harus dilalui . dengan demikian, anak tetap mendapatkan haknya kembali untuk hidup wajar jasmani, rohani dan sosial dengan wajar.

Nama Mata Kuliah : Sistem Peradilan Pidana

Kode : HIH 21-343

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah ini diberikan setelah mahasiswa memperoleh pengetahuan secara menyeluruh tentang pengertian, sejarah dan perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia, oleh sebab itu dalam hal mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bekerjanya hukum pidana materiil yang ditegakkan oleh hukum acara pidana dalam suatu sistem peradilan pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana sendiri merupakan salah satu bagian dari peradilan umum, dan peradilan umum merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia.

Materinya meliputi pengertian sistem peradilan di Indonesia dan sistem peradilan pidana, perbandingan beberapa model peradilan pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan UU No

8/1981 tentang KUHP, proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, area penegakan hukum pidana dan disparitas pidana dan kriminalisasi yang berlebihan.

#### WAJIB BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Nama Mata Kuliah : Kapita Selektta Hukum Tata Negara

Kode : HIH 21-349

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Kapita Selektta Hukum Tata Negara yang terdiri dari : 1) Makna dari prinsip negara Indonesia adalah negara kesatuan, penerapan negara kesatuan, konsekuensi diterapkannya prinsip negara kesatuan; 2) Makna dari prinsip otonomi daerah, pembagian urusan, urusan pemerintah pusat, urusan pemerintahan daerah provinsi, urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 3) Makna prinsip negara hukum Indonesia, ciri-ciri negara hukum demokratis, tata urutan peraturan perundang-undangan; 4) Makna prinsip negara demokrasi/kedaulatan rakyat, contoh penerapan prinsip negara demokrasi Indonesia; 5) Makna pengaturan kekuasaan di negara Indonesia, pengaturan kekuasaan secara horisontal dan vertikal, lembaga negara pemegang kekuasaan baik secara horisontal maupun vertikal; 6) Pemilu di Indonesia, jenis-jenis pemilu di Indonesia, pelaksanaan dan problematikanya di Indonesia; 7) Pengadilan Tata Negara Indonesia (Mahkamah Konstitusi), Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, putusan Mahkamah Konstitusi.

Nama Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Tata Negara

Kode : HIH 21-350

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Perbandingan HTN sebagai ilmu adalah ilmu hukum yang menggunakan metode perbandingan hukum dengan melakukan analisis terhadap penerapan aliran pikir negara dan hukum, Ilmu Negara pada HTN Indonesia dan pada HTN berbagai Negara. Analisa tersebut dilakukan untuk:

- a. menemukan prinsip-prinsip umum (universal) yang diterapkan pada HTN Indonesia dan pada HTN diberbagai negara di dunia.
- b. Modifikasi penerapannya, dan
- c. Faktor yang berpengaruh terhadap penerapannya.

Nama Mata Kuliah : Lab. Perancangan Hukum

Kode : HIH 21-351

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Laboratorium Perancangan Hukum yang berada di Bagian Hukum Tata Negara dan merupakan mata kuliah yang bersifat teknis, sehingga lebih banyak berlatih untuk menyusun berbagai peraturan perundang-undangan. Di samping itu mahasiswa diharapkan memiliki ketrampilan di didalam menyusun dan membuat Naskah Akademik dan Rancangan UU dan Perda pedoman sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Nama Mata Kuliah : Hukum Perikanan

Kode : HIH 21-352

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagian yang membahas: pengertian hukum perikanan Indonesia sebagai bidang studi; wilayah perikanan Indonesia; pembagian urusan dibidang perikanan; pengelolaan perikanan; usaha perikanan; dan pengadilan perikanan.

#### **PILIHAN BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

Nama Mata Kuliah : Hukum dan Politik

Kode : HIH 21-353

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Hukum dan politik adalah bidang studi yang mempelajari hukum sebagai fenomena politik dan bagaimana membuat analisis politik terhadap fenomena hukum.

Nama Mata Kuliah : Hukum dan Kependudukan

Kode : HIH 21-354

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Hukum dan Kependudukan memberikan pemahaman tentang, Makna, latar belakang, ruang lingkup hukum dan kependudukan, serta hubungan antara hukum dan kependudukan. Selain itu, juga memberikan pengetahuan tentang kebijakan dari Indonesia mengenai kependudukan.

Nama Mata Kuliah : Hukum Peradilan Konstitusi

Kode : HIH 21-355

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Hukum Peradilan Konstitusi memberikan pemahaman tentang konsep dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara MK, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Umum, Prosedur Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Prosedur Beracara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Prosedur Beracara Pembubaran Partai Politik, Prosedur Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), prosedur beracara untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD dan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau wakil Presiden.

Nama Mata Kuliah : Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi

Kode : HIH 21-356

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian memberikan pemahaman tentang, Makna, Fungsi Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, asas asas Kewarganegaraan, Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan dan Keimigrasian, dan pengaturan Kewarganegaraan dan Keimigrasian saat ini.

#### **WAJIB BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Nama Mata Kuliah : Kapita Selektta Hukum Administrasi Negara

Kode : HIH 21-358

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Kapsel HAN memberikan penjelasan tentang hal-hal terbaru yang akan dikaji dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, dan secara khusus termasuk Hukum Pajak dan Hukum Keuangan Negara.

Nama Mata Kuliah : Hukum Keuangan Negara

Kode : HIH 21-359

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Hukum Keuangan Negara memberikan penjelasan tentang hal-hal di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas negara yang diwujudkan dalam bentuk APBN maupun APBD.

Nama Mata Kuliah : Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Asing

Kode : HIH 21-360

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai hal-hal sebagai berikut : 1. Sejarah berdirinya ILO, Struktur Organisasi ILO dan tugas-tugasnya, Konvensi dan Rekomendasi. 2. Perlindungan pekerja migrant menurut Konvensi PBB Tahun 1990 dan Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri menurut UU Nomor 39 Tahun 2004. Dan 3. Arti penting keselamatan dan kesehatan kerja bagi buruh menurut UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Nama Mata Kuliah : Lab. Ketenagakerjaan, Perpajakan dan Perijinan

Kode : HIH 21-361

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Peradilan Pajak membahas tentang Syarat formil dan materiil Perjanjian, Praktik membuat Perjanjian Kerja, Praktik Perjanjian Kerja Bersama, Praktik Membuat Peraturan Perusahaan, Praktik membuat Perjanjian Kerja Outsourcing, Praktik pengisian SPT 1770 SS, SPT 1770 S , SPT Wajib Pajak Perorangan, Praktik membuat Permohonan Berbagai Jenis Perizinan.

#### PILIHAN BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Administrasi Negara

Kode : HIH 21-362

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Perbandingan HAN merupakan mata kuliah pengembangan yang bermanfaat bagi mahasiswa sehingga mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan mengenai tujuan mempelajari perbandingan HAN, perbandingan administrasi negara sistem demokrasi dengan diktator, perbandingan administrasi negara sistem pancasila dengan sistem liberal, perbandingan administrasi negara Amerika dengan Inggris, perbandingan administrasi negara Arab Saudi dengan Jepang, perbandingan administrasi negara sistem pancasila dengan Amerika, dan perbandingan administrasi negara-negara ASEAN.

Nama Mata Kuliah : Hukum Sumber Daya Alam (Pertambangan dan Kehutanan)

Kode : HIH 21-363

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Hukum Sumber Daya Alam merupakan matakuliah pengembangan dan minat khusus bagian hukum administrasi negara. Mata kuliah ini berorientasi pada analisa Pengaturan (regelandaad), Pengelolaan (beheersdaad), Kebijakan (beleid), Pengurusan (bestuursdaad) dan Pengawasan (toezichthouensdaad) di bidang sumber daya alam di Indonesia dengan menguraikan kondisi ideal serta melakukan analisis kasus-kasus rill pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, diantaranya: Pertambangan (emas, perak, besi), Air, Kehutanan, energi (Geothermal, Minyak, Gas), dan Keindahan Alam (Pariwisata, lingkungan).

Nama Mata Kuliah : Hukum Tata Guna Tanah  
Kode : HIH 21-364  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Hukum Tata Guna Tanah merupakan matakuliah pengembangan dan minat khusus bagian hukum administrasi negara. Mata kuliah ini berorientasi pada analisa Pengaturan (regelendaad), Kebijakan (beleid), Pengurusan (bestuursdaad) dan Pengawasan (toezichthouensdaad) di bidang Tata Guna Tanah di Indonesia dengan menguraikan konsepsi dan asa- asas, tujuan, objek dan subjek, pengurusan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa, serta melakukan analisis pengaturan pemanfaatan penata gunaan tanah.

Nama Mata Kuliah : Hukum Penyelesaian Perselisihan Pajak  
Kode : HIH 21-365  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Mata kuliah Peradilan Pajak membahas tentang sistem peradilan pajak, yang meliputi fungsi dan tujuan peradilan pajak, pengertian dan jenis sengketa pajak, upaya hukum yang ditawarkan dalam sengketa pajak yang meliputi upaya administrasi dan peradilan pajak , penggolongan , karakternya serta pembedaan upaya hukum yang didasarkan pada jenis sengketa pajak, kompetensi peradilan pajak, kedudukan peradilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia ( studi komparatif dan normatif ), mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan serta menganalisis sistem peradilan pajak yang ada di Indonesia.

Nama Mata Kuliah : Hukum Peradilan Hubungan Industrial  
Kode : HIH 21-366  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Mata kuliah Hukum Peradilan Hubungan Industrial memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai hal-hal sebagai berikut : pengertian perselisihan hubungan industrial, prinsip-prinsip penyelesaiannya, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan serta pelaksanaan putusan PHI.

Nama Mata Kuliah : Hukum Pengadaan Barang dan Jasa  
Kode : HIH 21-367  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Hukum Pengadaan Barang dan Jasa merupakan matakuliah pengembangan dan minat khusus bagian hukum administrasi negara. Mata kuliah ini berorientasi pada pemahaman tentang aspek hukum pengadaan barang dan jasa di Indonesia dengan materi sebagai berikut: 1). konsepsi, peristilahan, definisi dan tujuan pengadaan barang dan jasa; 2). Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi dasar hukum, karakteristik, objek, dan pengecualian-pengecualian dalam pengadaan barang dan jasa; 3). Struktur kelembagaan pengadaan barang dan jasa; 4). AUPB dan Good Governance dalam pengadaan barang dan jasa; 5). Prosedur dan mekanisme pengelolaan instrumen pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, 6). Pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, dan 7). Aspek Hukum pemanfaatan E-procurement, E-procurement, E-Tendering, dan E-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Nama Mata Kuliah : Hukum Kesehatan Publik dan Biomedik  
Kode : HIH 21-368  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Mata kuliah Hukum Informasi Publik dan Keamanan Nasional mempelajari tentang landasan filosofis, prinsip-prinsip dan teori tentang hukum kesehatan publik dan biomedik, hidup dan nilai-nilai hidup sebagai hak dasar manusia, pemikiran moral, maksud, jangkauan dan urgensinya bagi kehidupan manusia sebagai basis etika dan penelitian biomedis, keadilan dan pelayanan kesehatan publik sebagai telos negara, politik hukum sistem pelayanan kesehatan publik sebagai telos negara dan hak fundamental (human right) masyarakat warga (civil society) serta

implemetasinya yang berorientasi pada tata kelola kesehatan lingkungan yang berkelanjutan.

Nama Mata Kuliah : Hukum Perencanaan dan Prosedur Administrasi Perpajakan

Kode : HIH 21-369

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Hukum Perencanaan dan Prosedur Administrasi Pajak memberikan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak atau penanggung pajak dan pemerintah dalam sistem self assessment berdasarkan UU KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan). Mata kuliah ini, memberikan pemahaman kewajiban-kewajiban wajib pajak yang harus dilakukan dalam rangka self assessment system (pendaftaran, NPWP /Nomor Pokok Wajib Pajak, SPT (Surat Pemberitahuan), Pembayaran Pajak), Hak-hak wajib pajak ( hak-hak dalam sengketa pajak, hak penundaan pembayaran pajak, keringanan pajak, dan sebagainya). Kewajiban pemerintah ( Pemeriksaan, Penagihan), penyelesaian sengketa pajak, Sanksi-sanksi dalam hukum pajak.

Nama Mata Kuliah : Hukum Tata Ruang

Kode : HIH 21-370

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Hukum Tata Ruang merupakan matakuliah pengembangan dan minat khusus bagian hukum administrasi negara. Mata kuliah ini berorientasi pada analisa Pengaturan (regelandaad), Kebijakan (beleid), Pengurusan (bestuursdaad) dan Pengawasan (toezichthouensdaad) di bidang Tata ruang di Indonesia dengan menguraikan konsepsi dan asa-asa, tujuan, objek dan subjek, pengurusan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa, serta melakukan analisis pengaturan pemanfaatan penataan ruang.

Nama Mata Kuliah : Hukum Informasi Publik dan Keamanan Nasional

Kode : HIH 21-371

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Hukum Informasi Publik dan Keamanan Nasional mempelajari tentang kewenangan pengelolaan informasi publik yang berada pada domein negara, domein publik dan domein privat, perancangan regulasi produk eksekutif (executive act), kewenangan, implementasi, tata kelola , pengambilan keputusan, dan solusi hukum dalam konteks tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan: 1) informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. 2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 3) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

#### **WAJIB BAGIAN HUKUM ACARA**

Nama Mata Kuliah : Hukum Eksekusi Perdata

Kode : HIH 21-372

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Hukum Eksekusi Perdata memberikan pemahaman mengenai upaya paksa untuk merealisasikan hak pihak kreditur/pihak yang menang dalam putusan perdata bila debitur/pihak yang kalah dalam putusan perdata tidak melaksanakan kewajibannya dengan secara sukarela. Upaya paksa untuk merealisasi hak dan/atau sanksi meliputi yang tersebar dalam ketentuan Hukum Perdata Materiil dan hukum perdata formil (Hukum Acara Perdata) serta dalam perjanjian-perjanjian.

Nama Mata Kuliah : Hukum Eksekusi Pidana



Kode : HIH 21-373  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata kuliah ini mempelajari tata cara pelaksanaan putusan serta tata cara pelaksanaan macam-macam pidana, termasuk pidana yang diperuntukkan bagi terpidana anak.

Nama Mata Kuliah : Hukum Pembuktian  
Kode : HIH 21-374  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata kuliah Hukum Pembuktian terdiri dari 2 (dua) materi bidang hukum yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Mata kuliah hukum pembuktian pada dasarnya merupakan mata kuliah yang memberikan pendalaman lebih lanjut dari mata kuliah yang terkait dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil serta hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Mata kuliah Hukum Pembuktian dipandang penting untuk diajarkan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum karena masalah pembuktian merupakan hal yang sangat krusial dalam peradilan pidana dan perdata. Cara berfikir analitis dan penggunaan logika hukum di dalam proses pemeriksaan perkara akan tercakup dalam hukum pembuktian. Materi di dalam mata kuliah hukum pembuktian bidang pidana akan dibahas mengenai pengertian pembuktian, alat-alat pembuktian, penguraian pembuktian, kekuatan pembuktian, dasar pembuktian, dan beban pembuktian. Sedangkan dalam hukum pembuktian bidang perdata akan dibahas mengenai Pengertian Hukum Pembuktian, Letak hukum Pembuktian dalam perundang-undangan Indonesia, Arti membuktikan, pentingnya pembuktian dalam perkara perdata, penawaran pembuktian, perjanjian pembuktian, tugas hakim dalam penyelesaian perkara perdata dan dalam pembuktian, kekuatan pembuktian dan alat bukti.

Nama Mata Kuliah : Hukum tentang Sita  
Kode : HIH 21-375  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata kuliah Hukum Sita memberi pemahaman mengenai sifat hukum sita, akibat hukum dari sita, sita diperluas dan dipersempit, jenis sita perdata menurut HIR dan RV, kekhususan sita menurut RV, vergelijkende beslag, penagihan pajak dengan surat paksa, sita pajak dan sita pidana.

#### **PILIHAN BAGIAN HUKUM ACARA**

Nama Mata Kuliah : Hukum Eksekusi Tata Usaha Negara  
Kode : HIH 21-376  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata kuliah bidang hukum eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan kendala yang ada skripsi.

Nama Mata Kuliah : Manajemen Peradilan  
Kode : HIH 21-377  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata kuliah Manajemen Peradilan memberikan pemahaman mengenai manajemen suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara, terutama dalam penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara untuk dapat mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Cara menangani perkara yang dimasukkan ke pengadilan. Mengelola suatu pengadilan agar tercipta suasana kerja yang nyaman bagi para hakim dan karyawan lainnya, maupun para pencari keadilan.

Nama Mata Kuliah : Kriminalistik  
Kode : HIH 21-378  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Mata kuliah ini mempelajari proses penyelidikan/penyidikan suatu kejahatan yang terjadi dengan memanfaatkan berbagai ilmu modern, seperti ilmu fisika, ilmu kimia, biologi dan lain-lain.

Nama Mata Kuliah : Ilmu Kedokteran Kehakiman

Kode : HIH 21-379

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah ini mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran/kedokteran gigi di dalam proses peradilan serta memahami peranan dokter sebagai saksi/ahli di dalam suatu kejahatan yang terjadi.

Nama Mata Kuliah : Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kode : HIH 21-380

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan pemahaman bahwa penyelesaian sengketa perdata tidak selalu melalui jalur pengadilan. Setelah mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh lembaga penyelesaian sengketa perdata arbitrase dan APS, mahasiswa harus memahami kelebihan dan kekurangan penyelesaian melalui arbitrase dan APS.

Nama Mata Kuliah : Hukum Peradilan Agama

Kode : HIH 21-381

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah Peradilan Agama memberikan pemahaman mengenai HUKUM yang berkaitan dengan Peradilan Agama, yaitu tinjauan hukum mengenai Peradilan Agama di Indonesia. bahwa dalam SISTEM Kekuasaan Kehakiman di Indonesia perlu dipahami, Peradilan Agama adalah salah satu bagian dari sistem peradilan yang bersifat mandiri, baik organisasinya/ lembaganya yang berada di bawah MA, maupun peradilannya. Peradilan Agama diperlukan karena di dalam kehidupan bidang perdata, masyarakat Islam memiliki hukum sendiri yang merupakan “regious projection”, manifestasi dari sikap keagamaan masyarakat Islam. Untuk tegaknya keadilan di bidang hukum tersebut diperlukan Peradilan Agama sebagai peradilan khusus untuk masyarakat beragama Islam, atau untuk perkara-perkara yang menggunakan basic “Islamic culture”.

Nama Mata Kuliah : Hukum Peradilan Militer

Kode : HIH 21-382

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Hukum Peradilan Militer Menunjukkan Cakupan Hukum Pidana & Acara Peradilan Militer, Memaparkan Sistematisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer Bekerja.

Nama Mata Kuliah : Kemahiran Bantuan Hukum (KBH Perdata)

Kode : HIH 21-383

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Kemahiran Bantuan Hukum memberikan ketrampilan tentang tata cara penanganan sengketa perdata yang terjadi melalui jalur non litigasi serta merancang pembuatan dokumen non litigasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata.

Nama Mata Kuliah : Kemahiran Bantuan Hukum (KBH TUN)

Kode : HIH 21-383

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah bantuan hukum ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan verbal untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar dan meningkatkan kemampuan pemahaman prosedur beracara.

### **WAJIB BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

Nama Mata Kuliah : Kapita Selektta Hukum Internasional

Kode : HIH 21-384

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Kapita Selektta Hukum Internasional adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mempelajari garis-garis besar dasar berlakunya serta perkembangan-perkembangan terakhir yang berpengaruh pada pengaturan dalam hukum internasional.

Nama Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Internasional

Kode : HIH 21-385

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah ini membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan kegiatan komersial internasional yang bersifat publik. Di dalamnya mencakup studi dan ruang lingkup hukum ekonomi internasional, prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional, Perkembangan GATT 1947 hingga Marrakesh Agreement, Prinsip Non diskriminasi, Unfair trade, safeguard, Hambatan teknis di bidang perdagangan, Sanitary and Phytosanitary Ageement, Pengecualian Pasal XX GATT, Perdagangan jasa (GATS), Model Penyelesaian Sengketa WTO.

Nama Mata Kuliah : Hukum Organisasi Internasional

Kode : HIH 21-386

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Hukum OI merupakan mata kuliah bidang minat yang mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur eksistensi dan aktivitas OI dalam masyarakat internasional. Pokok Bahasannya adalah pengertian dan pengetahuan dasar tentang Hukum OI, Status Hukum OI, Keanggotaan OI, Kegiatan OI, PBB sebagai OI sui generis dan peran PBB dalam usaha mencapai tujuan-tujuan PBB serta perkembangan pengaturan OI. Mata kuliah ini berusaha untuk menghubungkan pokok bahasan dengan realitas, dengan menggunakan berbagai contoh kasus yang terjadi dalam masyarakat internasional. Pembahasan Hukum OI akan menitikberatkan pada perkembangan OI baik secara teoritis maupun praktis. Dengan demikian mahasiswa dapat mengaplikasikan teori dengan kasus-kasus terkait.

Nama Mata Kuliah : Lab Perjanjian Internasional

Kode : HIH 21-387

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah ini berisi tentang ketrampilan praktis dalam merancang pembuatan kontrak internasional yang berisi para pihak, pengertian-pengertian, hak dan kewajiban, default, choice of law, choice of forum, force majeure; merancang legal opinion yang di dalamnya berisi nama pihak yang meminta LO, dasar pembuatan LO, dasar hukum, pengertian-pengertian, isu hukum, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi

### **PILIHAN BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

Nama Mata Kuliah : HAM dan Globalisasi

Kode : HIH 21-388

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata Kuliah ini membahas kaitan antara globalisasi dengan HAM. Didalamnya meliputi perkembangan globalisasi, implikasinya terhadap perkembangan dan pergeseran isu-isu HAM yang muncul, serta analisis terhadap berbagai kasus aktual yang terjadi.

Nama Mata Kuliah : Hukum Diplomatik & Konsuler

Kode : HIH 21-389

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :  
Mata Kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler merupakan mata kuliah pengembangan bagi mahasiswa program strata 1 (S-1) semester VII Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Mata Kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler mempelajari asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur tata cara hubungan diplomatik dan konsuler.

Nama Mata Kuliah : Hukum Udara dan Angkasa  
Kode : HIH 21-390  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Memahami pengertian Hukum Udara dan Ruang Angkasa dan mengetahui subyek maupun obyek Hukum Udara dan Ruang Angkasa serta mengerti istilah dan bentuk Hukum Udara dan Ruang Angkasa .

Nama Mata Kuliah : Hukum Lingkungan Internasional  
Kode : HIH 21-391  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Hukum Lingkungan Internasional adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mempelajari prinsip-prinsip, asas-asas dan aturan- aturan hukum positif yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas batas negara.

Nama Mata Kuliah : Hukum Humaniter Internasional  
Kode : HIH 21-392  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari bidang ilmu Hukum Internasional yang memfokuskan pengkajian pada hal-hal yang terkait dengan tata cara melakukan peperangan (conduct of war), perlindungan terhadap korban perang (protecting victim of war) serta peran kelembagaan kemanusiaan internasional dan mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional.

Nama Mata Kuliah : Hukum Transaksi Bisnis Internasional  
Kode : HIH 21-393  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata kuliah ini membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan kegiatan komersial internasional yang bersifat Swasta . Di dalamnya mencakup studi dan ruang lingkup hukum transaksi business internasional , prinsip-prinsip choice of law and choice of forum , Prinsip Foreign Investment , Hambatan dalam inetrenasional business transaksi termasuk anti dumping, safeguard, and CVD, serta bill of lading, letter of credit , dan Model Penyelesaian.

Nama Mata Kuliah : Hukum ASEAN  
Kode : HIH 21-394  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata kuliah ini mempelajari mengenai tujuan dan kedudukan ASEAN sebagai Organisasi Internasional, norma-norma yang berlaku sebagai sumber hukum ASEAN dan Komunitas ASEAN.

#### **WAJIB BAGIAN HUKUM DAN MASYARAKAT**

Nama Mata Kuliah : Hukum dan Kebijakan Publik  
Kode : HIH 21-395  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :  
Mata kuliah Hukum Dan Kebijaksanaan Publik akan membahas dan mempelajari Ruang Lingkup Hukum Hukum Dan Kebijakan Publik; Hukum Dan Kebijaksanaan Pemerataan; Hukum Dan Pembangunan; Paradigma Reversal; Pemberdayaan Hukum

Melalui Pembangunan Alternatif; Perlindungan Hukum Terhadap Pasien: Kasus Malpractice.

Nama Mata Kuliah : Hukum dan Wanita

Kode : HIH 21-397

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Hukum dan wanita atau Hukum dan Gender membahas dan memperkenalkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan di dalam hukum, sehingga diperlukan hukum yang berperspektif gender. Dengan memahami istilah-istilah kunci dan berbagai aliran dalam studi perempuan mahasiswa akan mempunyai kesadaran dan empati perlunya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum melalui instrumen hukum internasional dan nasional.

#### **PILIHAN BAGIAN HUKUM DAN MASYARAKAT**

Nama Mata Kuliah : Hukum dan Kemiskinan

Kode : HIH 21-399

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Hukum dan Kemiskinan merupakan mata kuliah untuk mengembangkan teori tentang hubungan antara hukum dan perekonomian. Mampukah hukum memberikan kontribusi kepada negara bangsa untuk mengatasi masalah kemiskinan yang secara riil ada pada setiap periode pembangunan. Teori-teori sosial tentang hukum yang telah dipelajari dalam mata kuliah hukum dan masyarakat akan dikembangkan, didalami sebagai pisau analisis dalam memahami hubungan hukum dan kemiskinan. Konsep- konsep kemiskinan, sebab-sebab munculnya, serta cara penanggulangan kemiskinan khususnya melalui hukum sebagai sarana hendak dibahas dalam mata kuliah ini.

Nama Mata Kuliah : Hukum dan Sistem Budaya

Kode : HIH 21-400

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Hukum Dan Masyarakat akan membahas dan mempelajari Ruang Lingkup Hukum Sistem Budaya, Relevansi Hukum Variabel di Luar Hukum , Kedudukan Hukum Sebagai Bagian dari Sistem Budaya, Hukum Dan Nilai-nilai di Masyarakat , Hukum Tradisional dan Hukum Modern.

Nama Mata Kuliah : Hukum dan Alih Teknologi

Kode : HIH 21-401

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Hukum dan Alih Teknologi, membahas mengenai perubahan yang sungguh cepat berlangsung dalam perkembangan teknologi sudah layaknya ditangkap oleh hukum. Ketidak-mampuan hukum menangkap semangat kecepatan perubahan teknologi akan berakibat fatal. Maka untuk membahas urgensi hukum yang progresif mengikuti derasnya arus perkembangan teknologi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hukum dan teknologi yang berdialektika dengan persoalan penanaman modal, paten, perdagangan internasional, globalisasi ekonomi, dan investasi merupakan masalah yang pelik, sulit untuk dipecahkan dalam waktu yang singkat.

#### **WAJIB BAGIAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM**

Nama Mata Kuliah : Penemuan Hukum

Kode : HIH 21-403

Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

mata kuliah Penemuan Hukum adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana memecahkan masalah hukum konkret dengan cara

menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaedah-kaedah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan oleh ilmu hukum.

Nama Mata Kuliah : Filsafat Logika dan Etika  
Kode : HIH 21-404  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Mata Kuliah Filsafat Logika dan Etika berupaya membangun pemahaman, sekaligus 'kecakapan', mahasiswa yang berkenaan dengan semacam 'ilmu' untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. 'Ilmu' di sini merujuk kepada kemampuan rasional untuk mengetahui. Adapun 'kecakapan' mengacu kepada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan Ilmu [Pengetahuan] ke dalam tindakan. Mata Kuliah Filsafat Logika dan Etika juga berupaya membangun pemahaman mahasiswa tentang nilai atau kualitas yang menjadi pokok bahasan mengenai standar dan penilaian moral. Dalam hal ini, pokok bahasan ini mencakup pula analisis dan penerapan konsep seperti benar - salah, baik - buruk, serta tanggung - jawab.

Nama Mata Kuliah : Logika Hukum  
Kode : HIH 21-405  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Mata Kuliah Logika Hukum memberikan pemahaman bahwa penggunaan logika hukum dalam kajian hukum merupakan hal yang vital sehingga dapat meningkatkan kemampuan menalar dengan logika dalam menemukan kebenaran ilmiah.

#### **PILIHAN BAGIAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM**

Nama Mata Kuliah : Transformasi Hukum  
Kode : HIH 21-406  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Mata Kuliah Transformasi Hukum pertama-tama membangun pemahaman mahasiswa tentang salah satu konsep pemikiran hukum yang membedakan antara keberlakuan hukum secara tunggal, yakni 'monisme', yang berpijak pada gagasan objektivisme, dan keberlakuan hukum secara berganda, yakni 'dualisme', yang bertumpu pada gagasan voluntarisme. Terma Transformasi Hukum itu sendiri pada dasarnya memang lebih banyak dikembangkan pada ranah Hukum Internasional, khususnya dalam dinamika hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional. Kendati demikian, melalui Mata Kuliah Transformasi Hukum ini, diharapkan dapat pula ditelusuri dinamika hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Lokal.

Nama Mata Kuliah : Perubahan Hukum  
Kode : HIH 21-407  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Dalam mata kuliah ini diuraikan tentang perubahan hukum secara umum di Indonesia, teori-teori perubahan hukum serta membandingkan dengan perubahan hukum di negara lain (Eropa).

Nama Mata Kuliah : Perkembangan Pemikiran Hukum  
Kode : HIH 21-408  
Jumlah SKS : 2  
Deskripsi :

Mata Kuliah Perkembangan Pemikiran Hukum pada dasarnya membangun pemahaman tentang hukum, termasuk perkembangan pemikiran yang menyertainya, secara paradigmatis dan komprehensif. Untuk itu, mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk menelusuri relasi antara hukum dan perubahan politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Bersama ini, mata kuliah ini juga membawa mahasiswa untuk memahami, diantaranya, pluralitas hukum, interpretasi hukum, dan diskresi.

Nama Mata Kuliah : Bahasa Belanda  
Kode : HIH 21-409  
Jumlah SKS : 2

Deskripsi :

Mata kuliah Bahasa Belanda akan memberikan ketrampilan kepada Mahasiswa dalam memberikan pemahaman dan ketrampilan dalam pengucapan, membaca dan melafalkan Bahasa Belanda dengan baik dan benar. Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa menterjemahkan teks dalam Bahasa Belanda

#### 4. Pelaksanaan Perkuliahan

Setiap menjelang akhir semester, pengelola Program Studi S-1 Ilmu Hukum menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan suatu kurikulum. Jadwal kuliah yang disusun setidaknya mencakup beberapa aspek antara lain :

- a. nama mata kuliah dan kelas;
- b. koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
- c. hari dan jam kuliah;
- d. tempat/ruang kuliah;
- e. dosen pengampu.

Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan dalam beberapa kelas yang diampu oleh tim dosen pengajar yang mengajar mata kuliah yang bersangkutan. Penentuan tim dosen pengajar ditentukan oleh masing-masing kepala bagian berdasarkan kesesuaian kompetensi yang dimiliki pengajar dengan mata kuliah tersebut. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Materi kursus pada suatu diklat (pendidikan dan pelatihan) atau training yang diselenggarakan oleh lembaga yang bekerjasama dengan Undip dapat diakui sebagai mata kuliah dengan jumlah sks tertentu. Program magang bersertifikat selama 1 semester dapat diakui sebagai mata kuliah dengan capaian pembelajaran kurikulum yang ditetapkan oleh program studi S-1 Ilmu Hukum.

Pada kehidupan social di Universitas Diponegoro, para mahasiswa diwajibkan untuk mentaati sejumlah ketentuan, antara lain :

- a). mahasiswa diwajibkan berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada dalam lingkungan kampus.

- b). Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran secara aktif paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) persen dari aktivitas akademik terjadwal.
- c). Mahasiswa wajib mentaati peraturan yang berlaku.
- d). Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu, menghalangi, atau merendahkan martabat sivitas akademika lain.
- e). Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan mengganggu keutuhan NKRI. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) persen dari aktivitas akademik terjadwal (empat belas kali tatap muka), termasuk mata kuliah perbaikan.

Dalam hal mahasiswa tidak hadir dalam perkuliahan karena mengikuti kegiatan yang ditugaskan dan/atau disetujui oleh Rektor atau pimpinan fakultas, maka ketidakhadirannya tidak dihitung sebagai mangkir.

## **B. Magang**

Magang adalah kegiatan pelatihan kerja suatu pekerjaan tertentu di perusahaan atau instansi lainnya selama kurun waktu yang ditentukan program studi. Praktek magang menitikberatkan pada kegiatan mahasiswa yang dilakukan di masyarakat maupun instansi pemerintah atau swasta untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan melihat relevansinya di masyarakat maupun melalui jalur pengembangan diri dengan mendalami bidang ilmu tertentu dan aplikasinya.

### **1. Persyaratan dan Prosedur**

#### **1.1 Persyaratan**

Untuk pengambilan mata kuliah Kerja Praktek dan Tugas Akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mencapai jumlah kredit 115 SKS
- b. Lama tugas Kerja Praktek adalah sekurang-kurangnya 30 hari/180 jam, dengan rincian:
  - 1) 30 hari/180 jam untuk tugas lapangan dan pengumpulan data penelitian di lokasi kerja praktek
  - 2) 15 hari/90 jam untuk analisis data
  - 3) 15 hari/90 jam untuk penyusunan laporan
- c. Lokasi Kerja Praktek merupakan lembaga/instansi/perusahaan dan bukan milik perorangan, sesuai dengan bagian peminatan yang dipilih mahasiswa dan yang disetujui oleh ketua bagian masing-masing/dosen pembimbing
- d. Kerja Praktek tidak bisa menjadi alasan untuk ijin meninggalkan kuliah.

#### **1.2 Prosedur Permohonan**

Prosedur permohonan Kerja Praktek bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:



- a. Pada awal perkuliahan, mahasiswa bersangkutan mengajukan surat permohonan Kerja praktek yang ditandatangani Dekan kepada pimpinan instansi kerja praktek yang dituju (maksimal 3 lokasi), yang telah disetujui oleh ketua bagian/dosen pembimbing dengan dilampiri:
  - 1) Kartu Rencana Studi (KRS) semester berjalan
  - 2) Daftar Kumpulan Nilai (DKN)
  - 3) Fotokopi KTM
- b. Surat permohonan mencakup lokasi yang dituju dan jadwal pelaksanaan kerja praktek.
- c. Subbagian Akademik melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan mahasiswa tersebut.
- d. Melapor ke Subbagian Akademik, lokasi Kerja Praktek yang disetujui

### 1.3 Pelaksanaan Kerja Praktek

1. Sebelum pelaksanaan Kerja Praktek, mahasiswa mengambil berkas ke Subbagian Akademik antara lain:
  - a. Surat Pengantar yang ditujukan ke pimpinan lembaga/instansi/perusahaan lokasi kerja praktek.
  - b. Buku Panduan Kerja Praktek
  - c. Lembar Daftar Hadir
  - d. Lembar Penilaian Kerja Praktek
2. Pelaksanaan Kerja Praktek oleh mahasiswa dilakukan sekurang-kurangnya 30 hari/180 jam
3. Selama kerja praktek, mahasiswa wajib mengkonsultasikan masalah dan pembahasan kepada pembimbing lapangan dari instansi tempat kerja praktek dan dosen pembimbing kerja praktek .
4. Dalam melakukan kerja praktek, mahasiswa wajib mengisi lembar kegiatan selama kerja praktek.
5. Setelah selesai kerja praktek, mahasiswa wajib meminta surat keterangan selesai kerja praktek dan lembar penilaian kerja praktek dari Pembimbing lapangan.

### 1.4 Penilaian

Penilaian kerja praktek dilakukan oleh Pembimbing Lapangan Instansi tempat Kerja Praktek, dengan indikator meliputi sebagai berikut:

1. Perilaku (Bobot 40%)  
Meliputi Sikap, inovasi, etos kerja, kerjasama dan disiplin
2. Laporan kerja praktek (Bobot 60%)  
Meliputi unsur penguasaan materi serta skill kompetensi dan tata penulisan
3. Semua hal yang berkaitan dengan penilaian kerja praktek dan hasil laporan kerja praktek harus tertuang dalam lembar berita acara penilaian
4. Bentuk penilaian:

| Range Penilaian | Kategori    |
|-----------------|-------------|
| 81 – 90         | Sangat Baik |

|         |       |
|---------|-------|
| 71 – 80 | Baik  |
| 60 – 70 | Cukup |

### 1.5 Pelaporan Kerja Praktek

1. Setelah Kerja Praktek selesai, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kerja Praktek yang telah dilakukan yang diketahui instansi tempat kerja praktek, dosen pembimbing kerja praktek dan Ketua Bagian Peminatan
2. Menyerahkan Laporan pelaksanaan Kerja Praktek ke Subbagian Akademik paling lambat 2 (dua) minggu setelah Kerja Praktek selesai dilaksanakan, dengan dilampiri:
  - a. Laporan Pelaksanaan Kerja Praktek
  - b. Hasil Penilaian Kerja Praktek
  - c. Fotokopi Surat Keterangan Telah Melaksanakan Kerja Praktek dari instansi yang bersangkutan.

### C. Tugas Akhir - Penulisan Hukum (Skripsi)

#### 1. Syarat Tugas Akhir - Penulisan Hukum (Skripsi)

Untuk mengambil mata kuliah Tugas Akhir - Penulisan Hukum (Skripsi), mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mencapai jumlah kredit 120 SKS;
- b. IP Kumulatif sama atau lebih besar dari 2,00 (IPK 2,00);
- c. Telah lulus atau sedang menempuh mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.

#### 2. Panduan Tugas Akhir - Penulisan Hukum (Skripsi)

Prosedur permohonan Tugas Akhir - Penulisan Hukum (Skripsi) bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut :

##### a. Tahapan Pengajuan Judul

- 1) Pada awal pengisian IRS mahasiswa melalui dosen wali memasukkan rencana pengambilan mata kuliah Tugas Akhir-Penulisan Hukum dalam IRS.
- 2) Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah perkuliahan dimulai, mahasiswa bersangkutan harus sudah mengajukan Judul (sementara) Tugas Akhir-Penulisan Hukum dan Pokok-pokok Pikiran (1 – 2 halaman) ke Ketua Bagian untuk dievaluasi dan proses pemberian persetujuan.
- 3) Mahasiswa melakukan pendaftaran Tugas Akhir secara online lewat SIAP.
- 4) Judul (sementara) Tugas Akhir-Penulisan Hukum dan Pokok-pokok Pikiran yang telah disetujui oleh Ketua Bagian diserahkan ke Sub Bagian Akademik untuk direkap sebagai bahan Rapat Koordinasi Penentuan Pembimbing pada minggu ke 3 (tiga).
- 5) Tim Tugas Akhir-Penulisan Hukum terdiri atas: Wakil Dekan I, Prodi S-1 dan para Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum UNDIP.

- 6) Tim Tugas Akhir-Penulisan Hukum menetapkan 2 (dua) orang Dosen Pembimbing sebagai Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II atau Pembimbing Utama dan Wakil Pembimbing bagi mahasiswa yang bersangkutan melalui Rapat Koordinasi Penentuan Pembimbing.
- 7) Tugas Akhir-Penulisan Hukum bersifat lintas bagian dibicarakan dalam Rapat Koordinasi Penentuan Pembimbing.
- 8) Sub Bagian Akademik merekap Hasil Rapat Koordinasi Penentuan Pembimbing dan menerbitkan Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing yang disahkan oleh Wakil Dekan I.
- 9) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penunjukan Dosen Pembimbing, mahasiswa bersangkutan harus sudah menyampaikan Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing dilampiri Judul dan Pokok-pokok Pikiran Tugas Akhir - Penulisan Hukum pada Dosen Pembimbing. Sejak saat itu proses pembimbingan Tugas Akhir - Penulisan Hukum dimulai.
- 10) Dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah mahasiswa menyampaikan Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing kepada Dosen pembimbing I dan Dosen pembimbing II, Ketua Bagian melakukan monitoring pertama perkembangan pembimbingan Tugas Akhir - Penulisan Hukum tersebut.
- 11) Monitoring perkembangan pembimbingan berikutnya dilakukan secara berkala dalam tiap jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dan seterusnya agar proses pembimbingan dapat berjalan lancar dan tanpa kendala.
- 12) Apabila dalam proses pembimbingan terdapat hal-hal yang membuat proses pembimbingan mengalami kendala yang sangat signifikan, maka dapat dilakukan penggantian Dosen Pembimbing.
- 13) Syarat untuk dapat dilakukan Penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir - Penulisan Hukum adalah:
  - a) Menjalankan tugas pada instansi lain,
  - b) Tugas belajar diluar kota/luar negeri,
  - c) Pensiun,
  - d) Sakit yang tidak memungkinkan pembimbingan lagi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 60 hari,
  - e) Apabila setelah 15 (lima belas) hari berkas Tugas Akhir-Penulisan Hukum diserahkan oleh mahasiswa kepada pembimbing dan tidak ada tanggapan/respon dari pembimbing, dan mahasiswa sudah mengkomunikasikan,
  - f) Atau alasan lainnya yang bersifat krusial.
- 14) Prosedur pengajuan penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir - Penulisan Hukum adalah sebagai berikut:

- a) Mahasiswa mengajukan permohonan penggantian pembimbing secara tertulis kepada Ketua Bagian dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas yang ditandatangani oleh mahasiswa pemohon;
- b) Ketua Bagian mempelajari usulan mahasiswa bersangkutan dan melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi yang lengkap, dan komprehensif dari kedua belah pihak baik dari mahasiswa dan dosen pembimbing;
- c) Apabila alasan yang disampaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan benar/dapat diterima dan Ketua bagian mempunyai kesimpulan bahwa kegiatan pembimbingan sudah sulit dilakukan di antara kedua belah pihak, maka Ketua bagian berhak untuk melakukan penggantian dosen pembimbing bagi mahasiswa bersangkutan;
- d) Ketua bagian menunjuk/menugaskan Dosen Pembimbing Baru bagi mahasiswa bersangkutan dengan persetujuan Ketua Program Studi dengan tembusan kepada Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam perubahan Dosen Pembimbing pada SIAP;
- e) Bersamaan dengan penunjukan/penugasan Dosen Pembimbing Baru maka Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Lama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- f) Penggantian penugasan Dosen Pembimbing Baru Tugas Akhir - Penulisan Hukum yang bersangkutan harus disampaikan kepada Dosen Pembimbing Lama dan Dosen Pembimbing Baru;
- g) Dosen Pembimbing Lama tidak diperkenankan untuk menjadi Dosen Penguji bagi mahasiswa bersangkutan apabila mahasiswa tersebut mengikuti ujian Tugas Akhir - Penulisan Hukum.

**b. Tahapan Dalam Hal Terjadi Perubahan Judul/Perubahan Dosen Pembimbing**

- 1) Dalam hal terjadi perubahan judul, Dosen Pembimbing tetap, berlaku prosedur Tahapan Pembimbingan pada Dosen Pembimbing.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan judul dan perubahan Dosen Pembimbing, prosedur dilakukan dengan cara sebagaimana tahapan 2.a.2) sampai dengan 2.a.8).

**D. Publikasi Mahasiswa**

**1. Syarat Publikasi Artikel/Jurnal Ringkasan Tugas Akhir-Penulisan Hukum**

Syarat untuk publikasi Artikel/Jurnal Ringkasan Tugas Akhir-Penulisan Hukum Program Studi S-1 Hukum Fakultas Hukum Undip yaitu:

- a. Telah dinyatakan lulus ujian Tugas Akhir-Penulisan Hukum oleh tim Penguji dan sudah keluar nilai Tugas Akhir-Penulisan Hukum .
- b. Harus disahkan oleh Pembimbing I dan Pembimbing 2.

## 2. Panduan publikasi Artikel/Jurnal Ringkasan Tugas Akhir-Penulisan Hukum

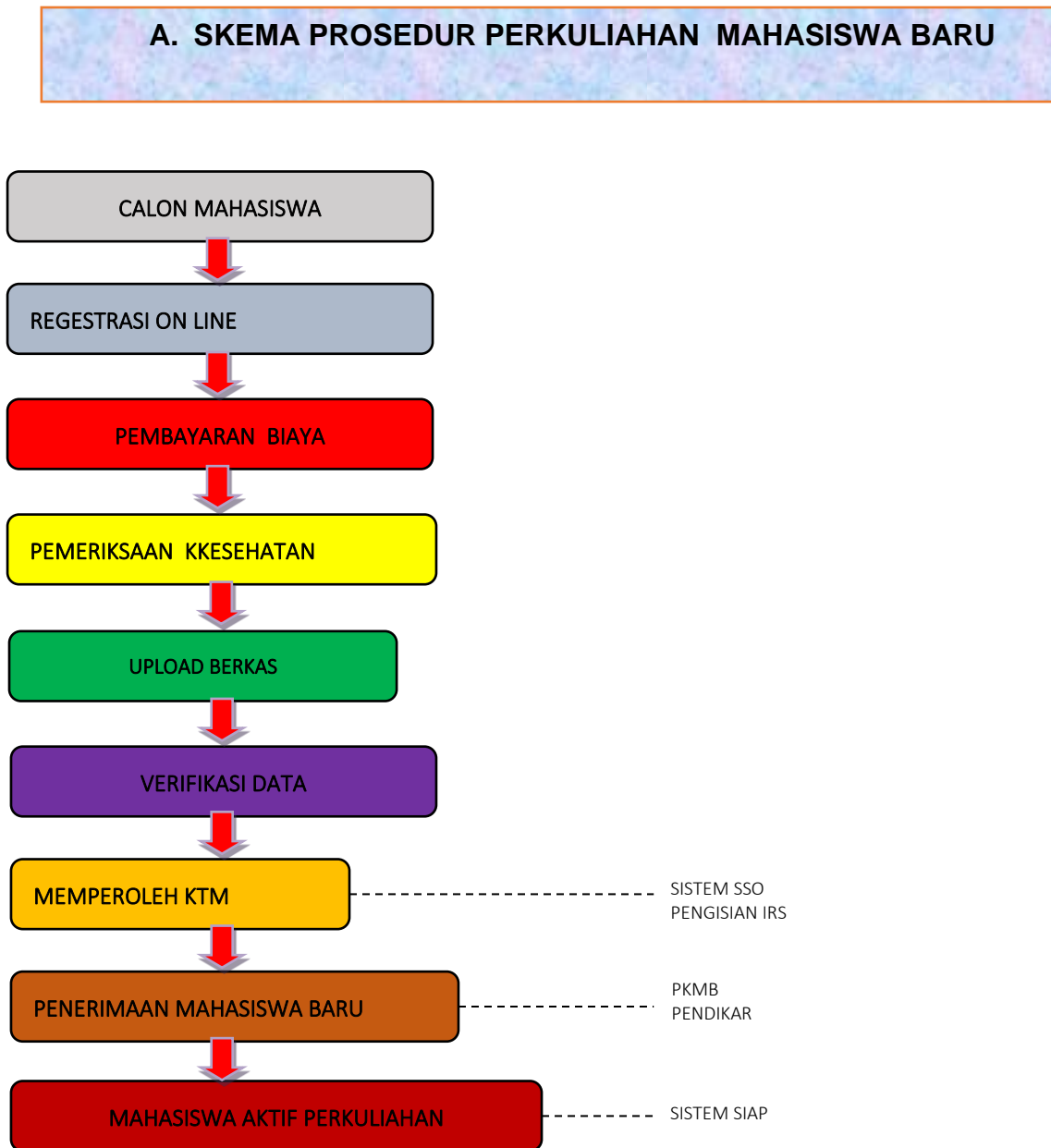
Panduan untuk penyusunan publikasi Artikel/Jurnal Ringkasan Tugas Akhir-Penulisan Hukum Program Studi S-1 Hukum Fakultas Hukum Undip yaitu:

- a. Artikel/Jurnal Ringkasan Tugas Akhir-Penulisan Hukum adalah karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel untuk jurnal yang merupakan ringkasan Tugas Akhir-Penulisan Hukum yang berbentuk memoranda hukum, studi kasus atau skripsi.
- b. Artikel/Jurnal Ringkasan Tugas Akhir-Penulisan Hukum belum pernah dipublikasikan.
- c. Ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan 1 spasi (halaman judul dan pengesahan dengan 1,5 spasi).
- d. Menggunakan format kertas ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm), dengan margin tepi kiri dan atas masing-masing 4 cm, margin tepi kanan dan bawah masing-masing 3 cm.
- e. Menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran *font* 12 pt dengan menggunakan perangkat lunak pengolah kata (*word processor*), seperti *Open Office Writer* atau *Microsoft Word*.
- f. Panjang naskah adalah 10 sampai 15 halaman tidak termasuk halaman judul dan pengesahan.
- g. Struktur Penulisan memuat: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Abstrak, Abstract, Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka.
- h. Abstrak berisi pemadatan dari tujuan penulisan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Abstrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dengan spasi tunggal dalam satu paragraf dengan 100-125 kata. Untuk abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris, judul harus ditulis dalam huruf tebal (misalnya: *ABSTRACT*) dan isi abstrak harus ditulis dalam gaya *Italic*. Untuk abstrak yang ditulis dalam bahasa Indonesia, itu harus ditulis seperti dalam kalimat yang lain. Key Words/Kata Kunci harus ditulis setelah abstrak, yang terdiri dari 3-5 kata dalam huruf kecil.
- i. Pendahuluan harus jelas dan menggambarkan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel. Pendahuluan harus terdiri dari latar belakang, permasalahan atau tujuan penelitian, metode penelitian, konsep/teori yang digunakan untuk analisis, hasil penelitian dan pembahasan. Pada akhir paragraf, diakhiri dengan komentar tentang signifikansi mengenai identifikasi masalah.
- j. Metode penelitian memuat, metode pendekatan permasalahan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.
- k. Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat data atau informasi hasil penelitian yang diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan konsep dan teori
- l. Kesimpulan, berisi kristalisasi dari semua pembahasan permasalahan yang ada dalam artikel
- m. Judul, identitas penulis, abstrak dan kata kunci dibuat dalam layout satu kolom. Bagian utama naskah (pendahuluan, metode, dan seterusnya) disajikan dalam layout dua kolom.

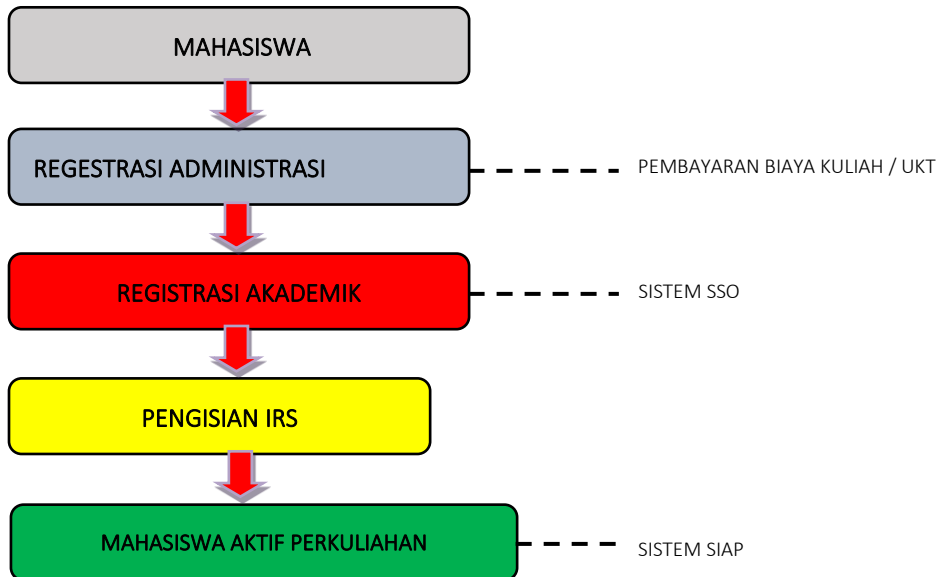
- n. Penomoran halaman judul dan pengesahan disebelah tengah bawah menggunakan huruf romawi kecil (i, ii, dan seterusnya). Penomoran halaman judul (i) tidak perlu ditampilkan.
- o. Penomoran halaman abstrak dan seterusnya disebelah kanan bawah menggunakan nomor urut (1, 2, 3, dan seterusnya).
- p. Penulisan nomor gambar berdasarkan nomor urut (Gambar 1, Gambar 2, dan seterusnya) diletakkan dibawah Gambar font 10 pt 1 spasi.
- q. Penulisan nomor tabel berdasarkan nomor urut (Tabel 1, Tabel 2, dan seterusnya) diletakkan diatas Tabel font 10 pt 1 spasi.

# LAMPIRAN –LAMPIRAN

## A. Alur Tahapan Perkuliahan

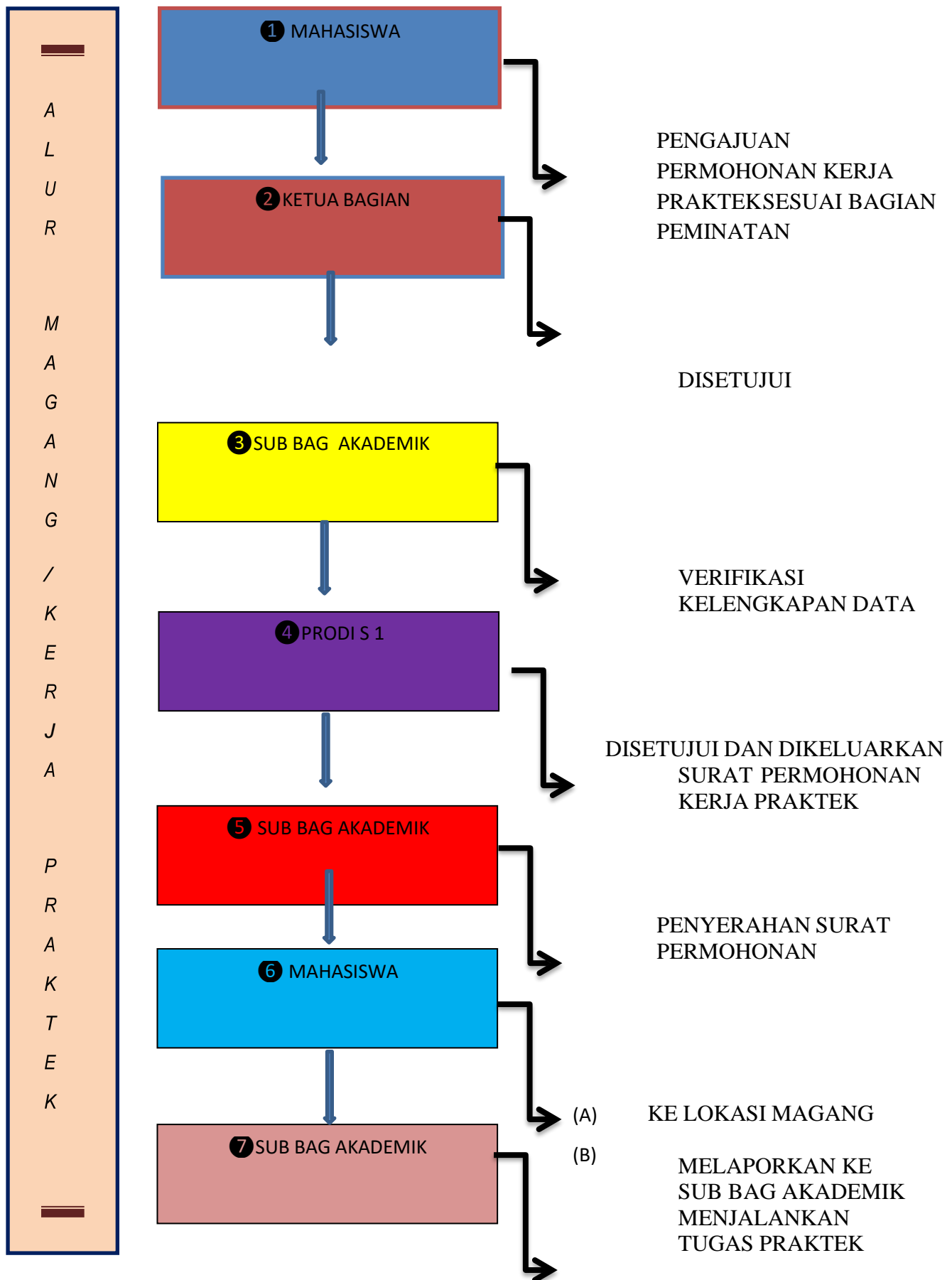


## B. SKEMA PROSEDUR PERKULIAHAN MAHASISWA LAMA



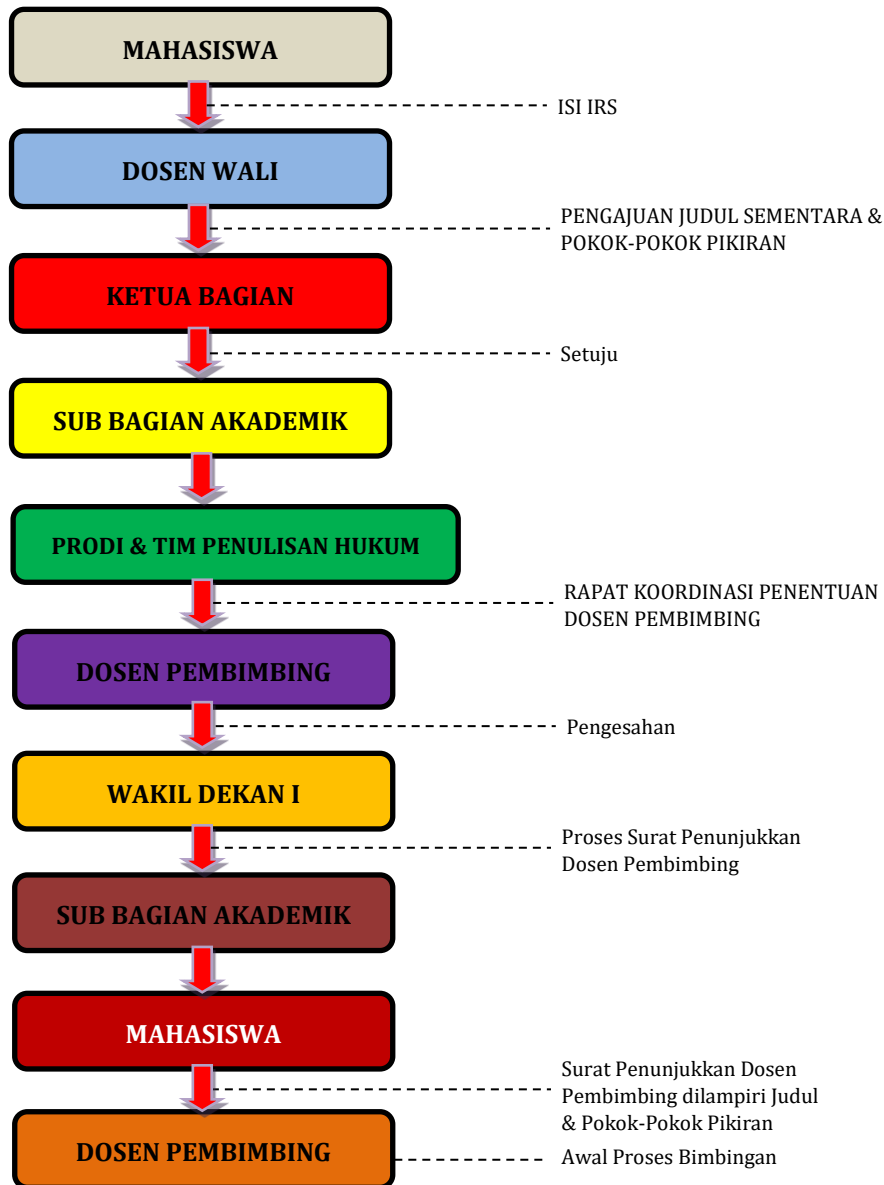


**B. Alur Magang (Kerja Praktek)**



C. Alur Tugas Akhir – Penulisan Hukum (Skripsi)

**SKEMA PROSEDUR TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM (SKRIPSI)**



#### **D. Contoh Cover Skripsi Dan Lain –Lain**

Contoh : 1

#### **FORMAT HALAMAN JUDUL**



#### **JUDUL TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**NAMA MAHASISWA**

NIM 11010110111213

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2021

Contoh : 2

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**JUDUL TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

**NAMA MAHASISWA**

NIM 11010110111213

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

.....  
NIP

.....  
NIP

Contoh : 3

**HALAMAN PENGUJIAN**

**JUDUL TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**NAMA MAHASISWA**

NIM 11010110111213

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal .. ..... ....

Dewan Penguji

Ketua

---

NIP

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

---

NIP

---

NIP

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

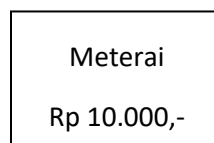
Marjo, S.H., M.Hum.  
NIP 196503181990031001

Contoh : 4

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, .. ..... ....



Nama  
NIM